Laporan

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA CILEGON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025-2029.

Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025 merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2025 dan Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2025 Selain capaian kinerja tahun 2025, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 juga memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota Cilegon, yaitu : ***Mewujudkan Cilegon yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan*** sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Cilegon

Dra. Hj. HENI ANITA SUSILA, M.Pd
NIP 19680225 199303 2 005

IKHTISAR

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon adalah Institusi pemerintah sebagai lembaga publik perlu menyajikan hasil kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja, yang diatur dalam pedoman penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025 disusun sebagai Laporan Kinerja atas pelaksanaan tugas pokok berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dilaporkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 – 2029, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Kerja Tahunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon secara proposional dan profesional tetap berupaya mencapai bobot yang baik dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan dari setiap kegiatan dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon sebagai pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan tingkat Kota Cilegon.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja Tahun 2025 dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU), serta disusun dalam pencapaian kinerja sebagai

pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pendidikan selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2025 serta perbandingan dengan tahun 2024 yang menyangkut dengan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pendidikan dan tugas yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025 ini. Mudah-mudahan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon menjadi instansi yang transparan dan akuntabel.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Cilegon

Dra. Hj. HENI ANITA SUSILA, M. Pd
NIP 19680225 199303 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah 11
D. Landasan Hukum 11
E. Sistematika 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

A. Rencana Strategis 15
B. Rencana Kerja Tahun 2025 28
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 39

A. Capaian Kinerja Organisasi 41
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis (Indikator Lama)..... 50
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis (Indikator Baru)..... 66
D. Analisis Keberhasilan Pencapaian Sasaran.....)..... 76

E. Realisasi Anggaran 92
F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 95
G. Inovasi 100
H. Penghargaan 101

BAB IV PENUTUP 102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan PNS Berdasarkan Jabatan Struktural 8

Tabel 1.2 Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu 10

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Cilegon 2025-2029 16

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 19

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama 20

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2025 28

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja 29

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan 31

Tabel 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja 34

Tabel 2.8 Perubahan Program dan Kegiatan 35

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 40

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Lama) 41

Tabel 3.2 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Baru) 43

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dan Realisasi Tahun Sebelumnya (2024) (Indikator Lama) 44

Tabel 3.3 1 Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dan Realisasi Tahun Sebelumnya (2024) (Indikator Baru) 46

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dan Target Jangka 47

Menengah (2026) (Indikator Lama)……

Tabel 3.4 1 Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dan Target Jangka Menengah (2029) (Indikator Baru)…… 48

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dengan Standar Nasional (indikator Lama)…..... 49

Tabel 3.5 1 Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dengan Standar Nasional (indikator baru)…..... 50

Tabel 3.6 Capaian Nilai Lakip Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 51

Tabel 3.7 Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Per Unsur Tahun 2025 …… 53

Tabel 3.8 Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 ……. 56

Tabel 3.9 Capaian Kinerja SPM Pendidikan …… 57

Tabel 3.10 Perhitungan Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi ……..... 60

Tabel 3.11 Perhitungan Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin …. 61

Tabel 3.12 Perhitungan Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah ……..... 62

Tabel 3.13 Perhitungan Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang Dibina ……..... 64

Tabel 3.14 Perhitungan Persentase Kajian Sejarah yang Dilakukan ……..... 65

Tabel 3.15 Perhitungan Persentase Penetapan Cagar Budaya yang ditetapkan. 65

Tabel 3.16 Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Per Unsur Tahun 2025….. 69

Tabel 3.17 Perhitungan Angka partisipasi PAUD Tahun 2025…….. 71

Tabel 3.18 Perhitungan Angka partisipasi Pendidikan Dasar Tahun 2025……. 72

Tabel 3.19 Perhitungan Angka partisipasi Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025.. 74

Tabel 3.20 Perhitungan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025..... 76

Tabel 3.21 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi (Indikator Lama) 76

Tabel 3.21 1 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi (Indikator Baru) 81

Tabel 3.22 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan (Indikator Lama) 85

Tabel 3.22 1 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan (Indikator Lama) 88

Tabel 3.23 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 93

Tabel 3.24 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran (Indikator Lama)..... 95

Tabel 3.24 1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran (Indikator Baru)..... 96

Tabel 3.25 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Satuan Pendidikan Formal 3

Gambar 1.2 Data Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Formal 4

Gambar 1.3. Data Peserta Didik Pendidikan Satuan Pendidikan Formal 5

Gambar 1.4 Data Satuan Pendidikan Non Formal 5

Gambar 1.5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan/Tutor Non Formal 5

Gambar 1.6. Data Peserta Didik Pendidikan Non Formal 6

Gambar 1.7 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara, maka prasarat utama adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan adanya iklim demokratisasi dan semakin tingginya semangat reformasi, maka tuntutan akan kepemerintahan yang baik akan semakin tinggi pula.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025, yang merupakan pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Maka dari itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kota Cilegon Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon berada di Pusat Ibu Kota. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan dan mengkoordinasikan sasaran kegiatan dinas, melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan dinas serta menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Dinas agar terlaksana dengan baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun potensi yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

1. Data Pendidikan Formal

a. Data Satuan Pendidikan

Gambar 1.1 Data Satuan Pendidikan Formal

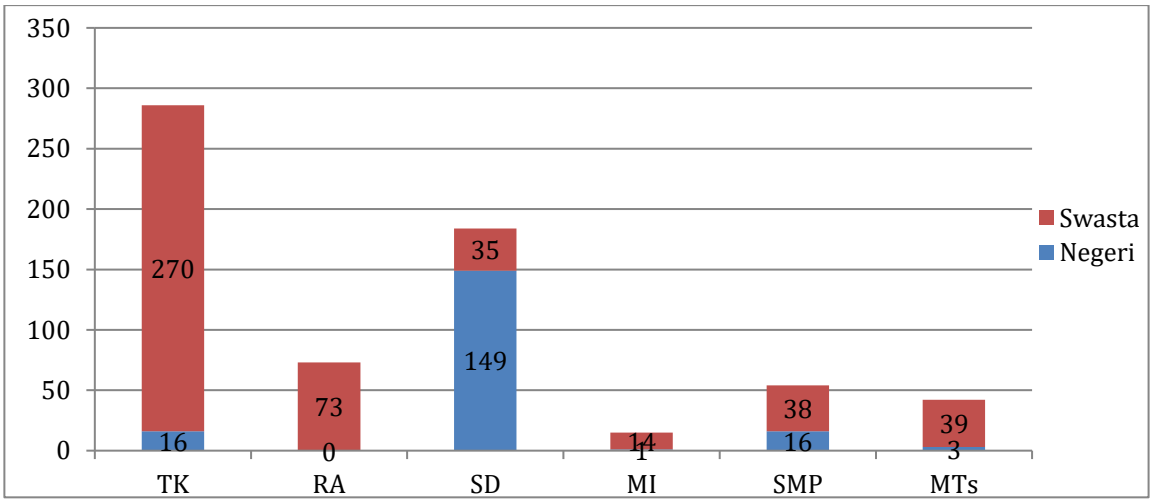

Sumber: Profil Pendidikan Kota Cilegon Tahun 2024

b. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Gambar 1.2. Data Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Formal

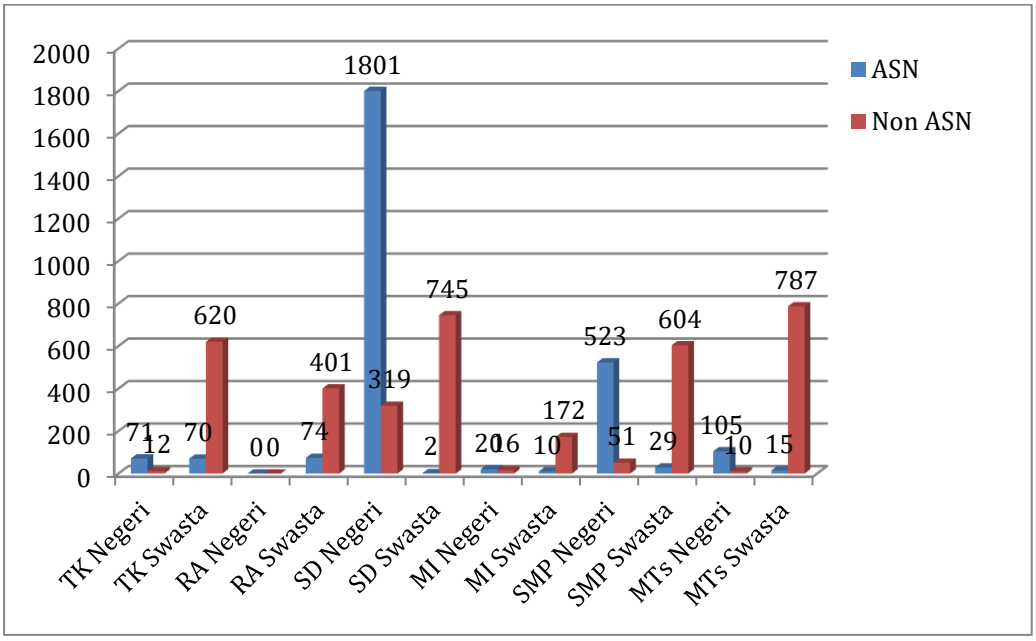

Sumber: Profil Pendidikan Kota Cilegon Tahun 2024

c. Data Peserta Didik

Gambar 1.3. Data Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal

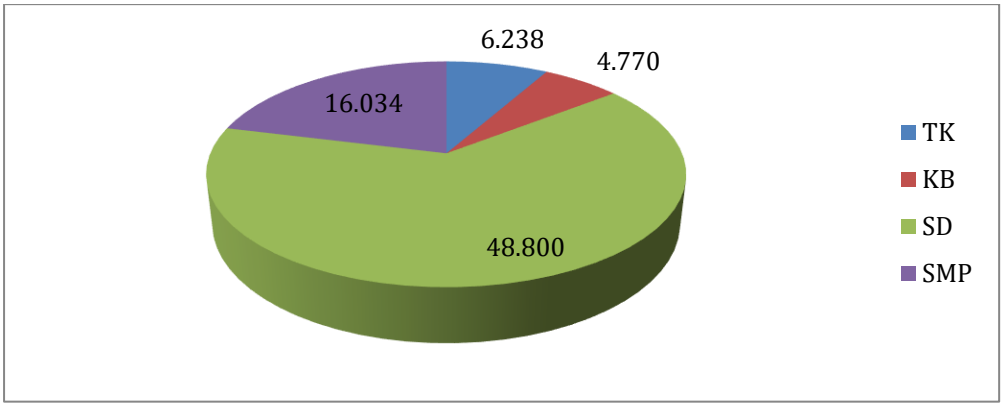

Sumber: Data Dapodik Kota Cilegon Tahun 2024

2. Data Pendidikan Non Formal

a. Data Satuan Pendidikan

Gambar 1.4. Data Satuan Pendidikan Non Formal

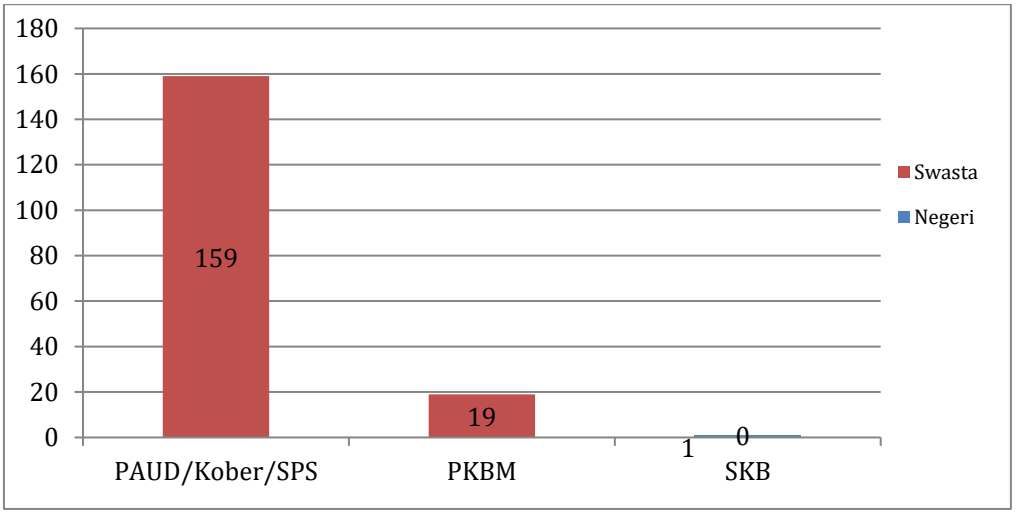

Sumber: Profil Pendidikan Kota Cilegon Tahun 2024

b. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan /Tutor Non Formal

Gambar 1.5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan/Tutor Non Formal

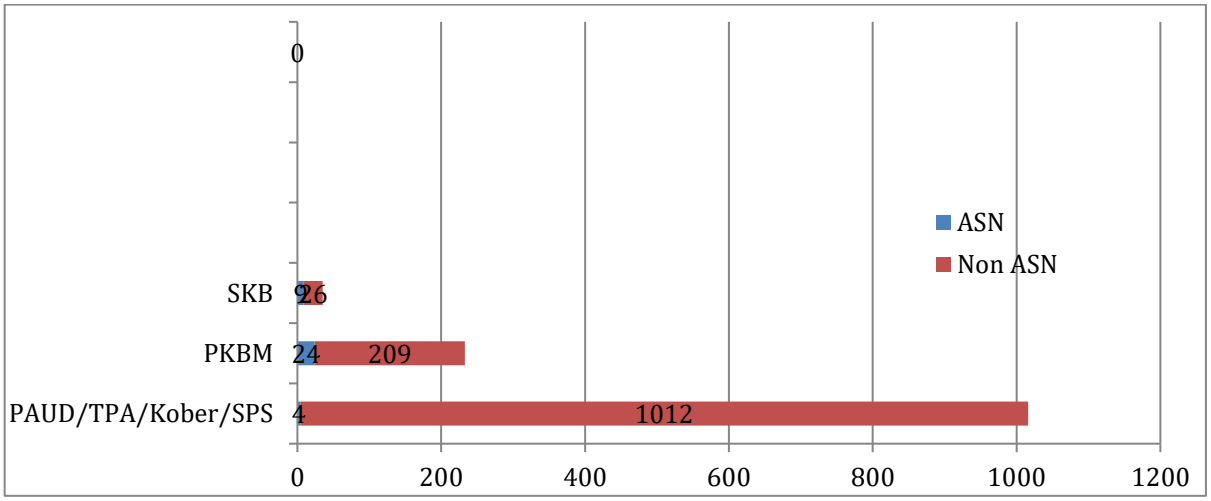

Sumber: Data Dapodik Kota Cilegon Tahun 2024

c. Data Peserta Didik

Gambar 1.6. Data Peserta Didik Pendidikan Non Formal

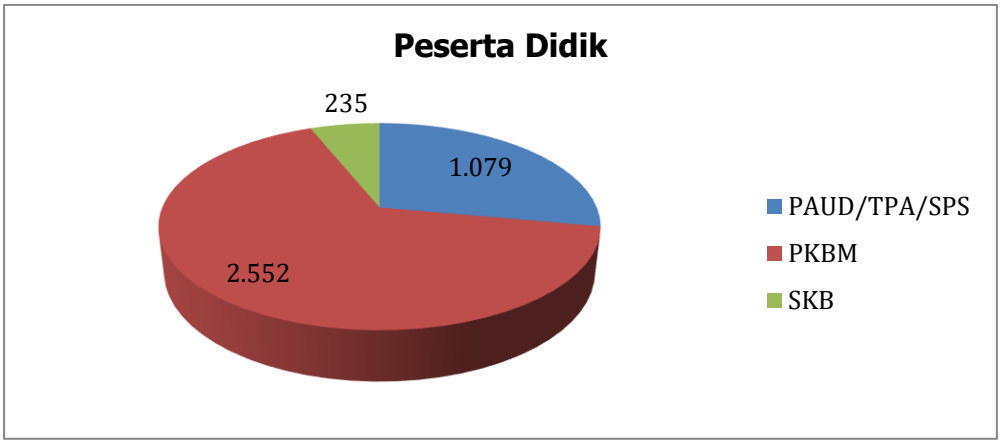

Sumber: Data Dapodik Kota Cilegon Tahun 2024

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor : 3 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, membawahi :
   - Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   - Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
4. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
   - Seksi Pendidikan Sekolah Dasar
   - Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
5. Bidang Ketenagaan, Bahasa dan Sastra, dan Pengendalian Perizinan, membawahi :
   - Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan

- Seksi Bahasa dan Sastra dan Pengendalian Perizinan

6. Bidang Kebudayaan
7. UPTD Balai Budaya
8. UPT Sekolah Menengah Pertama
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor : 3 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

Gambar 1.7

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon

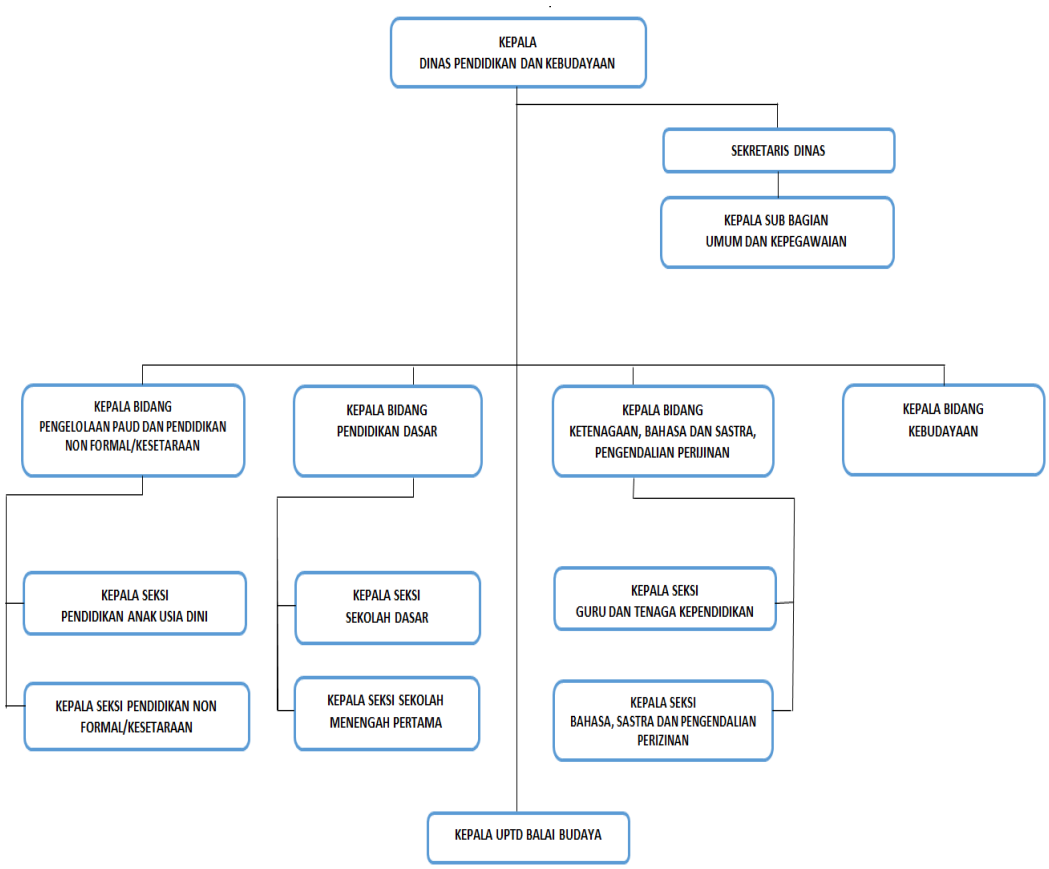

Sumber : Perwal Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun Susunan kepegawaian dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon meliputi tenaga struktural, tenaga administrasi dan tenaga fungsional yang tersebar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon seperti yang dijabarkan dalam tabel 6 berikut ini :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan PNS Berdasarkan Jabatan Struktural
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon
Tahun 2025

No	Nama Jabatan	PNS	TKK/ THL	Honor / GTY	JML	KUALIFIKASI PNS																		GOLONGAN PNS			
						S3		S2		S1		D3		D2		D1		SMA/ SMK		SMP		SD		IV	III	II	I
						L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1	Eselon II Kepala Dinas	1			1				1															1			
2	Eselon III Sekretaris Dinas	1			1			1																1			
3	Eselon III Kabid Pendidikan Dasar	1			1			1																1			
4	Eselon III Kabid Kebudayaan	1			1				1															1			
5	Eselon III Kabid Pengelolaan PAUD dan PNF	1			1				1															1			
6	Eselon III Kabid Ketenagaan, Bahasa dan Sastra, Pengendalian Perizinan	1			1			1																1			
7	Eselon IV Kasubag Umum dan Kepegawaian	1			1			1																1			

No	Nama Jabatan	PNS	TKK/ THL	Honor / GTY	JML	KUALIFIKASI PNS																		GOLONGAN PNS			
						S3		S2		S1		D3		D2		D1		SMA/ SMK		SMP		SD					
						L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	IV	III	II	I
8	Eselon IV Kasi Sekolah Dasar	1			1				1															1			
9	Eselon IV Kasi Sekolah Menengah Pertama	1			1				1															1			
10	Eselon IV Kasi PAUD	1			1				1																1		
11	Eselon IV Kasi Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1			1						1														1		
12	Eselon IV Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan	1			1				1																1		
13	Eselon IV Kasi Bahasa dan Sastra, Pengendalian Perizinan	1			1			1																	1		
14	Fungsional Umum	33			33			1	2	15	13	1	2					3							30	3	
15	Penjaga Sekolah	3			3													3								3	
Jumlah		48			48			6	9	15	14	1	2					6						9	34	6	

Sumber: DUK Dinas Pendidikan dan KebudayaanTahun 2025

Tabel 1.2 Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon

Tahun 2025

No	Nama Jabatan	PNS	TKK / THL	Honor / GTY	JML	KUALIFIKASI PNS																		GOLONGAN PNS			
						S3		S2		S1		D3		D2		D1		SMA/ SMK		SMP		SD		IV	III	II	I
						L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1	Pamong Budaya	2			2					1	2													1	2		
2	Pengawas	19			19			8	7		4													19			
3	Penilik	31			31			5	6	13	7													13	18		
4	Analis Kepegawaian	3			3					2	1														3		
5	Perencana	3			3			1	1		1														3		
6	Guru Total	1760			1760		2	44	103	281	1274	2	1	11	20			9	12					509	1208	43	
	GURU TK	180			180		2		5		171				1			1						7	159	14	
	GURU SD	1193			1193			18	45	196	885	1	1	9	17			8	12					335	830	28	
	GURU SMP	387			387			26	53	85	218	1		2	2									167	219	1	
JUMLAH		1818			1818		2	57	120	297	1289	2	1	11	20			9	12					542	1234	43	

Sumber: DUK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pelayanan Pendidikan Belum Optimal;
2. Pengelolaan Unit Layanan Disabilitas belum maksimal;
3. Pengelolaan Kebudayaan Daerah Belum Optimal;

D. Landasan Hukum

Sebagai Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tahun 2025, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Lampiran II; tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencazna Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon Jo. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon;

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Cilegon 2025-2029 sebagai berikut

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Cilegon 2025-2029

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
Mewujudkan Cilegon yang maju Sejahtera dan Berkelanjutan	Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh penduduk Cilegon	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yang merata dengan indikator Angka partisipasi PAUD dan pendidikan dasar 2. Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing dengan indikator Indeks pembangunan pemuda. 3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat dengan indikator Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM)
	Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan ekonomi yang inklusif	1. Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan indikator pertumbuhan realisasi investasi 2. Meningkatnya daya saing

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
		angkatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka
	Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Cilegon	1. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau dengan indikator indeks pelayanan publik di bidang pelayanan Kesehatan 2. Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat dengan indikator persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat
	Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator rasio kemandirian fiscal. 2. Terwujudnya transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dengan indikator indeks Pemerintahan Digital 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (sakip) 4. Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan indikator indeks kualitas kebijakan
	Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan kelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan	1. Terwujudnya infrastruktur layanan perkotaan yang inklusif, modern dan terintegrasi dengan indikator Indeks Infrastruktur 2. Meningkatnya keselarasan ruang dan berkembangnya kawasan strategis daerah dengan indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 3. Berkurangnya risiko bencana dengan indikator Indeks risiko bencana 4. Meningkatnya kualitas daya dukung lingkungan hidup dengan indikator Indeks kualitas

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
		lingkungan hidup 5. Meningkatnya keamanan dan kondusivitas daerah dengan indikator Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 6. Terwujudnya pemerataan pembangunan potensi kewilayahan dengan indikator persentase kelurahan cepat berkembang
	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan sistem kesejahteraan sosial	1. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial 2. Meningkatnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat dengan indikator Indeks daya beli 3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dengan indikator Indeks pembangunan keluarga

Sumber : RPJMD Kota Cilegon 2025-2029

Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu dirumuskan tujuan strategi, sasaran strategi dan kebijakan strategis Tahun 2025 - 2029 yang lebih jelas menggambarkan indikator-indikator atau ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Pada dasarnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dirumuskan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, adalah:

Tujuan :

1. Terwujudnya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Akuntabel dan Profesional
2. Terwujudnya tata kelola pendidikan yang berkualitas
3. Terwujudnya pelestarian kebudayaan yang dikembangkan

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.73	13.38	13.97	14.08	14.20
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10.42	10.53	10.64	10.75	10.86
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (poin)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2
1		Terwujudnya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	63.08	63.33	63.58	63.83	64.08
2		Terwujudnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Angka Partisipasi PAUD (%)	77.30	80.02	82.69	85.29	87.75
			Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (%)	98.53	98.80	99.03	99.22	99.37
			Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (%)	25.53	29.59	33.50	37.23	40.79
3		Terwujudnya pelestarian kebudayaan yang dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : RPJMD Kota Cilegon 2021 - 2026

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	Harapan Lama Sekolah = $FK = \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : FK = Faktor koreksi pesantren E = Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t P = Jumlah penduduk usia I pada	Hasil Perhitungan BPS

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					tahun t I = Usia (7,8, …., n)	
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun	Tahun	Ukuran yang menunjukkan berapa tahun rata-rata penduduk suatu wilayah telah menempuh pendidikan formal. RLS biasanya dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena diasumsikan bahwa pada usia tersebut, pendidikan formal seseorang telah selesai. RLS digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat dan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah.	$RLS = \frac{\sum (Jumlah\ tahun\ sekolah\ tiap\ individu\ usia\ 25+)}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 25\ tahun\ ke\ atas}$	Hasil Perhitungan BPS
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (poin)	Tahun	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi (2) dimensi Pendidikan (3) dimensi ketahanan sosial (4) dimensi warisan (5) dimensi ekspresi (6) dimensi budaya dan (7) dimensi kesetaraan gender. 7 dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator, yaitu: 1) Dimensi ekonomi a) Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai		DINDIKBUD

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) 2) Dimensi a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+ b) Harapan lama sekolah penduduk usia 7+ c) Angka Kesiapan Sekolah d) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian e) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah f) Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah 3) Dimensi ketahanan sosial a) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkun- gan sekitar tempat tinggal b) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal c) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat	$$IPK = \sum_{j=1}^{7} (W_j \times indeks\ D_j)$$ Keterangan: IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j = Bobot dimensi ke-j D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $$Indeks\ D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}\right) \times 100$$ Keterangan: D_j = Dimensi ke-j SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j	

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				dengan orang lain yang beda agama d) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku e) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir f) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong g) Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir h) Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga 4) Dimensi warisan a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi b) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi c) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari d) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang		

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				menonton secara langsung pertunjukkan seni e) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah f) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional 5) Dimensi ekspresi a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang member- ikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pen- dukung pertunjukkan seni d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat 6) Dimensi budaya a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/		

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				memanfaatkan taman bacaan masyarakat 7) Dimensi kesetaraan a) Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki b) Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat c) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki		
2	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai IRB berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IRB, maka semakin baik tingkat keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah tersebut. AA > 90-100 (istimewa) A > 80-90 (memuaskan) BB > 70-80 (sangat baik) B > 60-70 (baik) CC > 50-60 (cukup)	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				C > 30-50 (kurang) D 0-30 (sangat kurang)		
3	Terwujudnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	%	Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan	Hasil Perhitungan pada Raport Pendidikan *(Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang menempuh pendidikan anak usia dini dibagi Jumlah penduduk usia 5-6 tahun) x 100*	Raport Pendidikan
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	%	Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan	*Hasil Perhitungan pada Raport Pendidikan* *(Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang menempuh pendidikan SD SMP dibagi Jumlah penduduk usia 7-15 tahun) x 100*	Raport Pendidikan
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	%	Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan	*Hasil Perhitungan pada Raport Pendidikan* *(Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan) x 100*	Raport Pendidikan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Terwujudnya pelestarian kebudayaan yang dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (%)	%	Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi : a.tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional. (Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan)	*Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditargetkan di tahun n) x 100*	DINDIKBUD

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2026

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025 :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Peningkatan Layanan Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	81,50
			Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	73.47
			Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	88,00
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	%	100,00
			Proporsi Pendidik yang telah Lulus Sertifikasi	%	57.40
			Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	%	100,00
			Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	%	84,55
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya pelestarian budaya dan destinasi wisata	Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang dibina	%	100,00
			Persentase Kajian Sejarah yang Dilakukan	%	100,00
			Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	100,00

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 yang telah disepakati baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Layanan Pemerintahan / Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	81,50
		Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	73.47
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	88,00
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan / Terwujudnya	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	%	100,00

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	kualitas pendidikan yang merata	Proporsi Pendidik yang telah Lulus Sertifikasi	%	57.40
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	%	100,00
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	%	84,55
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat / Meningkatnya pelestarian budaya dan destinasi wisata	Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang dibina	%	100,00
		Prosentase kajian sejarah yang dilakukan	%	100,00
		Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	100,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025

No	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	367.472.197.450
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	160.647.257.666
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	991.573.000
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp	30.616.800
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp	338.864.600
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	1.329.435.000
7	Program Pembinaan Sejarah	Rp	430.874.000
8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	150.000.000
Jumlah Anggaran		**Rp**	**531.390.818.516**

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				**529.480.509.516**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**367.472.197.450**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	**88.00 Poin**	
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	**73.47 Poin**	
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	**81,50 Poin**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	157.243.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	349.654.552.185
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.420.177.877
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	11.495.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14.979.937.299
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.248.792.089
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			
		Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	**100%**	**177.641.319.000**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Pendidikan Dasar			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	84.879.696.029
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	46.127.914.637
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	24.861.536.800
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	4.778.110.200
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			
		Proporsi Pendidik yang telah Lulus Sertifikasi	**57.40%**	**991.573.000**
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	991.573.000
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	**100%**	**30.616.000**
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	30.616.800
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**			
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	**84.55%**	**338.864.600**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	338.864.0000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**1.910.309.000**
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			
		Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang dibina	**100%**	**1.329.435.000**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.329.435.000
7	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			
		Prosentase kajian sejarah yang dilakukan/jumlah kesejarahan yang ada	**100%**	**430.874.000**
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	430.874.000
8	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			
		Persentase Penetapan Cagar Budaya	**100%**	**150.000.000**
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			85.000.000
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan cagar Budaya peringkat kabupaten/Kota	100%	85.000.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			65.000.000
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		65.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Oktober tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkualitas dan Merata	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.42
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	6.1
1	Terwujudnya Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	63.08
2	Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang Berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	Persen	77.30
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	Persen	98.53
		Angka Partisipasi Kesetaraan	Persen	25.53
3	Terwujudnya Pelestarian Kebudayaaan yang Dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Persen	100

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025

No	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	362.789.990.951
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	161.306.746.083
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	291.213.000
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp	18.914.000
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp	54.244.000
6	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	1.119.224.200
7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	915.218.500
8	Program Pembinaan Sejarah	Rp	0
9	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp.	17.267.000
	Jumlah Anggaran :	**Rp**	**526.512.817.734**

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				**524.461.108.034**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**362.789.990.951**
		Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	**80 %**	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	**55 Poin**	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	**3 Poin**	
		Indeks Pelayanan Publik (poin)	**5 Poin**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	113.358.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	346.744.031.197
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	761.304.309

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14.460.814.995
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	710.482.450
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	**62,55%**	**161.306.746.083**
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	**70,03%**	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	**56,28%**	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	**63,13%**	
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	**72,49%**	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	**62,97%**	
		Iklim Keamanan SD	**75,82%**	
		Iklim Keamanan SMP	**71,20%**	
		Iklim Kebhinekaan SD	**72,55%**	
		Iklim Kebinekaan SMP	**71,31%**	
		Iklim Inklusivitas SD	**61,40%**	
		Iklim Inklusivitas SMP	**59,66%**	
	Pengelolaan Pendidikan Dasar			
		Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	86.326.586.939
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
		Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	46.399.460.594

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini			
		Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	23.260.166.550
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	5.320.532.000
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	**60,18 %**	**291.213.000**
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Capaian Kinerja Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	291.213.000
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			
		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	**100%**	**18.914.000**
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
		Capaian Kinerja Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	18.914.000
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**			
		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	**100%**	**54.244.000**
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
		Capaian Kinerja Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	54.244.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**2.051.709.700**
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	**62,5%**	**1.119.224.200**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
		Capaian Kinerja Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		1.119.224.200
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			
		Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	**35,29%**	**915.218.500**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Capaian Kinerja Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	915.218.500
7	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	**33,33%**	**0**
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Capaian Kinerja Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	0
8	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			
		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	**31,43**	**17.267.000**
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
		Capaian Kinerja Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	478.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
		Capaian Kinerja Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	16.789.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (outcome) yang dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tahun 2025.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Interval Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% - 100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Lama)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	**Peningkatan Layanan Pemerintahan** S1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	81.50 Poin	81,81	100,38%	Baik Sekali	LHE AKIP pada Dindikbud Kota Cilegon Tahun 2025
		Indeks RB Perangkat Daerah	73.47 Poin	63,08	85,84%	Baik	LHE PMPRB pada Dindikbud Kota Cilegon Tahun 2024
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	88.00 Poin	90,43	102,76%	Baik Sekali	Penilaian IKM internal pada Dindikbud Kota Cilegon Tahun 2025
2	**Peningkatan Kualitas Pendidikan** S2.1.1 Terwujudnya Kualitas Pendidikan yang Merata	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	100 %	84,44	84,44%	Baik	SPM Bangda Tahun 2025
		Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi	57.40%	39,23	68,34%	Cukup	PPG Guru tahun 2025
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	100 %	100	100,00%	Baik	Data di hitung secara mandiri

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah Pada Masyarakat Usia Sekolah	84.55%	0	0%	Cukup	Terdampak Efisiensi Anggaran
3	**Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat** S5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan Destinasi Wisata	Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan	14 Even	14 event	100%	Baik	Dindikbud Kota Cilegon
		Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisonal yang Dibina	100%	100%	100%	Baik	Dindikbud Kota Cilegon
		Persenase Kajian Sejarah yang Dilakukan	100%	0	0%	Cukup	Terdampak Efisiensi Anggaran
		Persentase Penetapan Cagar Budaya	100%	0	0%	Cukup	Terdampak Efisiensi Anggaran

Dari data pada tabel di atas terdapat tiga sasaran yang terbagi dalam Delapan indikator kinerja. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, dua indikator melebihi target yang ditetapkan artinya capaian kinerja diatas 100%, yaitu pada indikator Nilai Lakip Perangkat Daerah (100,38%) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik (102,76%). Tiga indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 100%, yaitu Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin, Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan dan Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisonal yang Dibina, tiga indikator memilik capaian kinerja 0% yaitu indikator Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah Pada Masyarakat Usia Sekolah, Persentase Kajian Sejarah yang Dilakukan dan Persentase Penetapan Cagar Budaya dikarenakan kebijakan pemerintah terdampak efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak bisa di laksanakan sesuai rencana.

Tabel 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Baru)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkualitas dan Merata	Harapan Lama Sekolah	13.73	13,41	97,67%	Baik	Data di ambil dari BPS Cilegon dalam angka (Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Rata-Rata Lama Sekolah	10.42	10,40	99,81%	Baik	Data di ambil dari BPS Cilegon dalam angka (Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	6.1	60,09	98,51%	Baik	Data di ambil dari bapeda
	Terwujudnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	77.30	79,92	103,39%	Baik	data di hitung secara mandiri (Dapodik dan dukcapil)
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	98.53	99,33	100,81%	Baik	data di hitung secara mandiri (Dapodik dan dukcapil)
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	25.53	56,40	221%	Baik	data di hitung secara mandiri (Dapodik dan dukcapil)
	Terwujudnya pelestarian kebudayaan yang dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (%)	100.00	85,71	85,71%	Baik	data di hitung berdasarkan dari kegiatan di tahun 2025
	Terwujudnya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	63.08	63,08	100%	Baik	LHE PMPRB pada Dindikbud Kota Cilegon Tahun 2024

Dari data pada tabel di atas terdapat tiga sasaran yang terbagi dalam Delapan indikator kinerja. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, tiga indikator melebihi target yang ditetapkan artinya capaian kinerja diatas 100%, yaitu pada indikator Angka Partisipasi PAUD (103.39%), Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (100.81%) dan Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (221%). Satu indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 100%, yaitu indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, sementara empat indikator lainnya belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi empat indikator memiliki capaian diatas 80% yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (97.67%), Rata-Rata Lama Sekolah (99,81%),

Indeks Pembangunan Kebudayaan (98,51%) dan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (85.71%). Secara keseluruhan target indikator di atas 80%.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dan Realisasi Tahun Sebelumnya (2024) (Indikator Lama)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	**Peningkatan Layanan Pemerintahan** S1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	81.25 Poin	81.63 Poin	100,47%	81.50 Poin	81,81	100,38%
		Indeks RB Perangkat Daerah	72.12 Poin	63.08 Poin	87,47%	73.47 Poin	63,08	85,84%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	86.00 Poin	90.19	104,87%	88 Poin	90,43	102,76%
2	**Peningkatan Kualitas Pendidikan** S2.1.1 Terwujudnya Kualitas Pendidikan yang Merata	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	100 %	84.03%	84,03%	100%	84,44	84,44%
		Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi	54.66%	37.18%	68,02%	57,4%	39,23	68,34%
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	100 %	100%	100%	100%	100	100%
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah Pada Masyarakat Usia Sekolah	83.60%	96.50%	115,43%	84,55%	0	0%
3	**Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat** S5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan Destinasi Wisata	Jumlah Event Kebudayaan yang Diselenggarakan	0	0	0	14 Event	14 Event	100%
		Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisonal yang Dibina	100 %	100 %	100,00%	100%	100%	100%
		Persenase Kajian Sejarah yang Dilakukan	100 %	100 %	100,00%	100 %	0	0
		Persentase Penetapan Cagar Budaya	0	0	0	100 %	0	0

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Nilai Lakip Perangkat Daerah, Indeks Reformasi birokrasi perangkat daerah serta kepuasan Masyarakat (OPD pelayanan Publik) capaiannya turun sedikit di banding tahun sebelumnya yaitu Nilai Lakip Indeks sebesar 100,38% di banding tahun sebelumnya sebesar 100,47%, indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah capaiannya 85,84% di bandingkan tahun sebelumnya 87,47%. Adapun indeks kepuasan Masyarakat

(OPD Pelayanan Publik) capaiannya 102,76% di bandingkan tahun sebelumnya 108,87%.

Untuk Capaian Rata - rata pencapaian kinerja SPM Pendidikan tahun 2025 tercapai sebesar 84,44% naik di bandingkan tahun sebelumnya sebesar 84,03%, Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi tercapai sebesar 68,34% naik sedikit di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 68,02%. sedangkan Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin capaiannya sama seperti tahun sebelumnya yaitu 100%, adapun Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah Pada Masyarakat Usia Sekolah realisasinya 0% di bandingkan tahun sebelumnya sebesar 115,43%, di karenakan terdampak kebijakan pemerintah yaitu terdampak efisiensi anggaran.

Untuk Capaian Jumlah Event Kebudayaan yang Diselenggarakan tahun 2025 tercapai sebesar 100% sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah event yang di selenggarakan tidak ada atau tidak di laksanakan. Indikator Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisonal yang Dibina capaiannya sama seperti tahun sebelumnya yaitu 100%, untuk indikator Persentase Kajian Sejarah yang Dilakukan capaiannya turun di bandingkan tahun sebelumnya sebesar 0%, di karenakan terdampak efisiensi anggaran sehingga tidak di laksanakan, begitu juga dengan indikator Persentase Penetapan Cagar Budaya realisasinya 0% di karenakan terdampak kebijakan pemerintah yaitu terdampak efisiensi anggaran.

Tabel 3.3.1
Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dan Realisasi Tahun Sebelumnya (2024) (Indikator Baru)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	NA	NA	NA	10,42	10,40	99,81%
		Harapan Lama Sekolah	NA	NA	NA	13,73	13,41	97,67%
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	NA	NA	NA	61.00	60,09	98,51%
	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	NA	NA	63,08	63,08	100%
	Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang Berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	NA	NA	NA	77.30	79,92	103,39%
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	NA	NA	NA	98.53	99,33	100,81%
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	NA	NA	NA	25.53	56,40	220,92%
	Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan yang di kembangkan	persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	NA	NA	NA	100	85,71	85,71%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa. Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah capaiannya sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 63.08%, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah dengan target 10,42 tercapai 10,40 atau 99,51%, untuk indikator harapan lama sekolah terealisasi sebesar 13,41% dari target yang di tetapkan sebesar 13,73% atau 97,67% sedangkan indeks pemajuan kebudayaan (IPK) dengen target 60,00 terealisasi sebesar 60,09 atau 98,51%

Capaian Rata-Rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) mulai dari PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan mencapai diatas 100%. Angka Partisipasi PAUD yang di targetnya 77,30% terealisasi sebesar 79,92% atau 103,39%. Sedangkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar dengan target 98,53%

terealisasi sebesar 99,33% atau 100,81%. Pada angka partisiapsi Pendidikan kesetaraan dengan target 25,53% terealisasi sebesar 56,40% atau 220,92%. Atau capaian melebihi target yang sangat signifikan.

Capaian indikator persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan yakni sebesar 100% hanya tercapai 85,71% di karenakan anggaran kegiatan yang terdampak recofusin, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan.

Pada tabel berikutnya akan disajikan perbandingan realisasi tahun berjalan (2025) dengan target jangka menengah yang tertuang pada periode akhir Renstra 2025-2029. Pada tabel tersebut dapat dilihat indikator yang telah mencapai 100% adalah Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan Indikator dengan capaian diatas 80% meliputi Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Angka Partisipasi PAUD , Angka Partisipasi Pendidikan Dasar dan persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dan Target Jangka Menengah (2029) (Indikator Lama)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	**Peningkatan Layanan Pemerintahan** S1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	81.81 Poin	81.75 Poin	100,07%
		Indeks RB Perangkat Daerah	63.08 Poin	74.71 Poin	84,43%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	90.43	90 Poin	100,47%
2	**Peningkatan Kualitas Pendidikan** S2.1.1 Terwujudnya Kualitas Pendidikan yang Merata	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	84,44	100%	84,44%
		Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi	39,23	60,27%	65,09%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	100	100%	100%
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah Pada Masyarakat Usia Sekolah	0	85,45%	0%
3	**Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat** S5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan Destinasi Wisata	Jumlah Event Kebudayaan yang di selenggarakan	100	100 %	100%
		Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisonal yang Dibina	100	100 %	100%
		Persentase Kaijan Sejarah yang di lakukan	0	100%	0
		Persentase Penetapan Cagar Budaya	0	100 %	0%

Selanjutnya, akan disajikan perbandingan realisasi perangkat daerah tahun 2025 dengan standar nasional pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.1
Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dan Target Jangka Menengah (2029) (Indikator Baru)

o.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	10,40	10,86	95,76%
		Harapan Lama Sekolah	13,41	14.20	94,44%
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,09	62.00	96,92
	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,08	64,08	98,44%
	Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang Berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	79,92	87,75	91,08%
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	99,33	99,37	99,96
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	56,40	40,79	138,51%
	Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan yang di kembangkan	persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	85,71	100	85,71%

Selanjutnya, akan disajikan perbandingan realisasi perangkat daerah tahun 2025 dengan standar nasional pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dengan Standar Nasional (Indikator Lama)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	**Peningkatan Layanan Pemerintahan** S1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	81.81 Poin	80	102,26 %
		Indeks RB Perangkat Daerah	63.08 Poin	70	90.11 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	90.40	Baik	Baik
2	**Peningkatan Kualitas Pendidikan** S2.1.1 Terwujudnya Kualitas Pendidikan yang Merata	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	84,44%	100	84.44%
		Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi	39,23%	NA	NA
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	100%	NA	NA
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah Pada Masyarakat Usia Sekolah	0%	NA	NA
3	**Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat** S5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan Destinasi Wisata	Jumlah Event Kebudayaan yang di selenggarakan	14	NA	NA
		Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisonal yang Dibina	100%	NA	NA
		Persenase Kajian Sejarah yang Dilakukan	0	NA	NA
		Persenase Penetapan Cagar budaya	0	NA	NA

Pada tabel di atas, capaian Nilai Lakip Perangkat Daerah sudah mencapai standar nasional, sedangkan untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah capaiannya di atas 80% dan Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan akan tetapi capaiannya sudah diatas 75%.

Tabel 3.5.1
Perbandingan Realisasi Tahun Berjalan (2025) dengan Standar Nasional (Indikator Baru)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	10,40	9,07	95,76%
		Harapan Lama Sekolah	13,41	13,30	94,44%
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	60.09	NA	NA
	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,08	NA	NA
	Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang Berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	79,92	80,02	103,39%
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	99,33	98,80	100,81%
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	56,40	29,59	220,92%
	Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan yang di kembangkan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	85,71	NA	NA

Pada tabel di atas, capaian Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Angka Partisipasi PAUD. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar, Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan sudah mencapai standar nasional, sedangkan untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan belum mencapai standar nasional, akan tetapi capaiannya sudah diatas 80%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis (Indikator Lama)

1. Nilai LAKIP Perangkat Daerah

Nilai LAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Inspektorat Kota Cilegon terhadap empat komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar 81.81 Poin (A = Memuaskan), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian Nilai Lakip Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Komponen Akuntabilitas Kinerja yang Dievaluasi	Nilai	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
Perencanaan Kinerja	**26.96**		
Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja	6.00	Telah menyusun Renja, Renja Perubahan Rencana Proses, RKA, dan Perjanjian Kinerja.	Melakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang di tetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
Pemenuhan Standar Dokumen Perencanaan Kinerja	8.10	Dokumen perencanaan sudah diformalkan dan dipublikasikan pada web resmi, RKA dan PK telah selaras dengan Renstra dan Renja, tujuan dan sasaran menggambarkan kinerja yang akan dicapai dan berpedoman pada RPJMD, IKU dan PK telah memenuhi kriteria SMART dan berkelanjutan.	
Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kinerja	12,86	Renstra dan Renja telah dimanfaatkan untuk perumusan dan penetapan anggaran, pedoman dalam pencapaian tujuan san sasaran.	Perubahan renja masih berfokus pada anggaran saja.
Pengukuran Kinerja	**21.14**		
Pelaksanaan Pengukuran Kinerja	6.00	Definisi operasional jelas, dan terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja.	
Proses Pengukuran Kinerja	5.14	Telah melibatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan, data kinerja telah relevan dan mendukung pencapaian kinerja, teknologi infromasi telah dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja.	

Komponen Akuntabilitas Kinerja yang Dievaluasi	Nilai	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
Pemanfaatan Pengukuran Kinerja	10.00	Pengukuran kinerja telah dimanfaatkan untuk penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktifitas da penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.	Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk penempatan/penghapusan jabatan, penembapatan jabatan struktural dan fungsional, usulan penyesuaian organisasi dan penyusunan SKP periodik.
Pelaporan Kinerja	**10.59**		
Dokumen Pelaporan Kinerja	1.80	Sudah menyusun dokumen kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku, disusun secara berkala, telah diformalkan, disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan.	
Standar Dokumen Pelaporan Kinerja	4.50	Telah disusun sesuai ketentuan (Permenpan 54 Tahun 2014).	Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.
Pemanfaatan Dokumen Pelaporan Kinerja	4.29	Telah memberikan dampak untuk penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, digunakan untuk penyesuaian aktifitas, penggunaan anggaran, dan digunakan untuk evaluasi pencapaian dan untuk penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya.	Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan belum mempengaruhi prubahan budaya kinerja organisasi.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	**23.13**		
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5.00	Evaluasi LAKIP internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	
Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5.63	Telah dilaksanakan sesuai standar, telah berpedoman kepada permenpan 88 tahun 2021 dan Perwal Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2022, dilaksanakan oleh personil yang memadai dan telah menggunakan teknologi informasi.	
Implementasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	12.50		Belum seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP ditindaklanjuti.

2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh atas evaluasi APIP terhadap penilaian mandiri program reformasi birokrasi. Untuk tahun 2024 penilaian PMPRB belum selesai dilaksanakan, sehingga sesuai dengan yang tertera pada indikator kinerja utama (IKU) Dindikbud Kota Cilegon, maka nilai yang digunakan adalah nilai n-1, yaitu nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dindikbud Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar 63.08 poin, predikat B = cukup baik. Adapun rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Per Unsur Tahun 2024

NO	ASPEK	UNSUR	NILAI
1	**Aspek Pemenuhan**		**10.77**
1.1	Manajemen Perubahan		1,32
		Tim reformasi birokrasi	0,27
		Road map reformasi birokrasi	0,29
		Pemantauan dan evaluasibirokrasi	0,50
		Perubahan pola pikir danbudaya kerja	0,27
1.2	Deregulasi Kebijakan		1,00
		Harmonisasi	1,00
1.3	Penataan dan Penguatan Organisasi		1,95
		Evaluasi kelembagaan	0,95
		Tindak lanjut evaluasi	1,00
1.4	Penataan Tata Laksana		1,00
		Proses bisnis dan proseduroperasional tetap	0,50
		Keterbukaan informasi publik	0,50
1.5	Penataan Sistem dan Manajemen SDM		1,10
		Perencanaan kebutuhanpegawai	0,14
		Pengembangan pegawaiberbasis kompetensi	0,13
		Penetapan kinerja individu	0,28
		Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode	0,20

NO	ASPEK	UNSUR	NILAI
		perilaku	
		Pelaksanaan evaluasi jabatan	0,14
		Sistem informasi kepegawaian	0,00
1.6	Penguatan Akuntabilitas		1.94
		Keterlibatan pimpinan	0,95
		Pengelolaan akuntabilitaskinerja	1,00
1.7	Penguatan Pengawasan		0,80
		Gratifikasi	0,08
		Penerapan SPIP	0,14
		Pengaduan masyarakat	0,36
		Whistle blowing system	0,20
		Penangan benturankepentingan	0,02
		Pembangunan zona integritas	0,00
1.8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		1,64
		Standar pelayanan	0,28
		Budaya pelayanan prima	0,27
		Pengelolaan pengaduan	0,31
		Penilaian kepuasan terhadappelayanan masyarakat	0,49
		Pemanfaatan teknologi informasi	0,30
2	**Aspek Reform**		**12,00**
2.1	Manajemen Perubahan		2,38
		Komitmen dalam perubahan	1,21
		Komitmen pimpinan	1,00
		Membangun budaya kerja	0,17
2.2	Deregulasi Kebijakan		0,50
		Peran kebijakan	0,50
2.3	Penataan dan Penguatan Organisasi		0,00
		Organisasi berbasis kinerja	0,00
2.4	Penataan Tatalaksana		2,46
		Peta proses bisnis	0,34
		Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	0,63
		Transformasi digital	1,50
2.5	Penataan Sistem Manajeman SDM		1,00
		Kinerja individu	0,50
		Assesmen pegawai	0,00
		Pelanggaran disiplin pegawai	0,50
	Penguatan Akuntabilitas		2,09

NO	ASPEK	UNSUR	NILAI
2.6		Efektifitas dan efisiensianggaran	0,67
		Pemanfaatan aplikasiakuntabilitas	0.67
		Pemberian reward dan punishment	0,00
		Kerangka logis kinerja	0,75
2.7	Penguatan Pengawasan		0,98
		Penyampaian laporan hartakekayaan pejabat Negara	0,75
		Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara	0,00
		Penanganan pengaduanmasyarakat	0,23
2.8	Peningkatan kualitas pelayanan publik		2,93
		Upaya dan/atau inovasipelayanan publik	2,09
		Penanganan pengaduan danpelayanan konsultasi	0,84
Nilai Akhir			22.77
Nilai hasil konversi			63.08

Sumber :LHE PMPRB Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023

Dengan target yang ditetapkan sebesar **73.47 Poin** dan realisasi yang dicapai sebesar **63.08 poin**, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar **85.84%** dengan kategori Baik.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dengan membentuk tim pelaksana kegiatan survey kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ke-9 unsur tersebut yaitu :

- **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan baik teknis maupun administratif.

- **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan termasuk pengaduan.
- **Waktu Pelayanan**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
- **Biaya/Tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- **Kompetensi Pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- **Perilaku Pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- **Sarana dan Prasarana**, sarana yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam pencapaian maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
- **Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan perhitungan data terhadap jumlah responden penerima layanan sebanyak 80 orang diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025

NO	ASPEK	NILAI
1	Persyaratan	3.56
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.55
3	Waktu Penyelesaian	3.65
4	Biaya/Tarif	3.85
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.50
6	Kompetensi Pelaksana	3.75

7	Perilaku Pelaksana	3.56
8	Sarana dan Prasarana	3.57
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3.57
Nilai Konversi		**90.43**
Kategori		**Sangat Baik**

Dengan hasil nilai IKM sebesar 90.43 poin menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik, karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 102.76%.

4. Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan amanat dari Permendagri 100 tahun 2018 dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan layanan pendidikan kepada masyarakat. Realisasi rata-rata pencapaian SPM pendidikan Kota Cilegon di tahun 2025 adalah sebesar 77.04 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja SPM Pendidikan

Urusan	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Rumus		Elemen data	Capaian Kinerja
Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Jumlah usia 5 - 6 tahun pada sekolah PAUD	X 100 %	15943	= 79,92
			Jumlah Penduduk usia 5 – 6 tahun		19947	
Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi)	Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan	X 100 %	53270	= 99.13
			Jumlah Penduduk usia 7 – 15 Tahun		53733	

Urusan	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Rumus		Elemen data	Capaian Kinerja
		Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Mengengah (SMP/MTs)	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan	X 100 %	25370	= 99.70
			Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun		25445	
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar Usia 7 – 18 pada Pendidikan Kesetaraan	X 100 %	1102	= 56,40
			Jumlah Penduduk Usia 7 – 18 yang tidak tamat pendidikan dasar/menengah		1954	
Jumlah Keseluruhan SPM Pendidikan						**84,44**

Keterangan: Data di ambil dari SPM Bangda tahun 2025

Capaian di atas menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang diterapkan di Kota Cilegon berdasarkan Indikator Kinerja Utama mendekati target yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah ditandai dengan telah terukurnya indikator sebagai berikut :

1. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD terealisasi 79.92%; diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Usia 5-6 Pada Sekolah PAUD terhadap Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun. Capaian Pendidikan anak usia dini tahun 2025 naik dibandingkan tahun lalu, hal tersebut disebabkan karena banyaknya warga Negara usia 5-6 yang tidak bersekolah pada TK maupun PAUD, akan tetapi lebih memilih mengikuti bimbingan belajar atau les baca tulis sebagai

persiapan memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga capaian tidak maksimal.

2. Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI) telah terealisasi 99.13 %; didapat dengan membandingkan antara Jumlah Usia 7-12 pada jenjang SD/MI terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun. Secara umum, capaian tersebut menunjukan jenjang pendidikan dasar di Kota Cilegon telah memadai dengan adanya dukungan ketersediaan sarana–prasarana di sekolah.
3. Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs) telah terealisasi 99,70%; didapat dengan membandingkan antara Jumlah Usia 13-15 Pada jenjang SMP/MTs terhadap Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun. secara umum, capaian tersebut menunjukan jenjang sekolah menengah pertama di Kota Cilegon telah memadai dengan didukung ketersediaan sarana–prasarana di sekolah.
4. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan terealisasi 56,40%. Angka tersebut didapat dari perbandingan antara Jumlah Warga Belajar Usia 7-18 Pada Pendidikan Kesetaraan terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-18 tahun yang tidak tamat pendidikan dasar/menengah. Hal ini menunjukkan terpenuhinya Pendidikan Kesetaraan.

5. Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi

Sertifikasi guru atau sergur merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar disekolah.

Sertifikasi guru diberikan kepada tenaga pendidik yang sudah memenuhi syarat sebagai berikut :

- Memiliki kualifikasi Pendidikan akademik sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.
- Guru dalam jabatan atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas mengajar yang sudah diangkat.
- Berpengalaman mengajar minimal 5 tahun dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda tapi masih dalam satu ruang lingkup Yayasan yang sama.
- Guru bukan PNS yang memiliki status Guru Tetap Yayasan (GTY) atau guru yang diangkat Pemda yang mengajar pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Perhitungan jumlah Proporsi Pendidik yang telah lulus sertifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Perhitungan Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi

No	Rumus		Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah Pendidik Jenjang (PAUD+SD+SMP) Bersertifikat Pendidik	= (201+547+286) = 1034	57.40 %	39,23%	68,34%
	Jumlah Pendidik Jenjang (PAUD+SD+SMP)	= (1352+886+398) = 2636			

Dengan target yang ditetapkan sebesar 57.40% dan realisasi yang dicapai sebesar 38,23%, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memenuhi target yang di tetapkan akan tetapi capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 68,34%. Hal ini disebabkan karena tenaga pendidik belum memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikasi sebagaimana telah disebutkan di atas, seperti tenaga pendidik belum memiliki kualifikasi

pendidikan S1/D4 dan belum memiliki NUPTK. Sebab lainnya adalah penerbitan NRG (Nomer Registrasi Guru) memakan waktu yang cukup lama, sehingga tunjangan sertifikasi belum dapat dicairkan, ijazah yang dimiliki tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu, banyaknya tenaga pendidik yang telah lulus sertifikasi sudah mencapai usia pensiun dan ada pula yang meninggal dunia.

6. Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin

Izin Pendidikan merupakan suatu persetujuan dari suatu lembaga dalam pelaksanaan operasional suatu lembaga pendidikan. Dalam hal penerbitan surat izin operasional lembaga pendidikan, Dindikbud bertugas memberikan surat rekomendasi kepada lembaga pendidikan, dimana surat rekomendasi sebagai salah satu prasyarat dikeluarkan surat izin operasional yang nantinya diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Cilegon.

Tabel 3.11
Perhitungan Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin

No	Rumus		Target	Realisasi	Capaian
1	(Jumlah PAUD, SD, SMP yang Memiliki Izin/Jumlah Seluruh PAUD, SD, SMP) x 100	= $\frac{(303+34+38)}{(303+34+38)}$ x 100 = 100 %	100 %	100 %	100 %

Dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dan capaian realisasi sebesar 100 % dapat menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Dengan capaian kinerjan 100% berarti bahwa seluruh PAUD, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Cilegon telah memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan, hal ini menunjukkan adanya sinergitas antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku wakil pemerintah dengan penyelenggara pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Cilegon.

7. Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah

Bahasa Jawa Bebasan adalah Bahasa yang dipakai secara turun temurun oleh masyarakat Cilegon atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya. Bahasa dan sastra Jawa Cilegon wajib diajarkan pada jenjang Pendidikan dasar sebagai muatan lokal. Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran Bahasa dan sastra Jawa Cilegon paling sedikit 2 jam pelajaran setiap 1 (satu) minggu. Pada jenjang Pendidikan dasar, pembelajaran mulok dilaksanakan dari kelas I sampai dengan kelas VI, sedangkan pada jenjang Pendidikan sekolah menengah pertama, pembelajaran diberikan mulai kelas VII sampai dengan Kelas IX. Perhitungan tingkat pengenaan Bahasa daerah pada masyarakat usia sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Perhitungan Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah

No	Rumus		Target	Realisasi	Capaian
1	(Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP yang Belajar Bahasa Daerah/Jumlah Penduduk Usia 5-15 Tahun) x 100	$= \frac{0}{0} \times 100$ $= 0\%$	84,55 %	0 %	0 %

Dengan target yang ditetapkan sebesar 84.55 % dan capaian realisasi kinerja sebesar 0%, kegiatan ini tidak di laksanakan di karenakan terdampak kebijakan pemerintah yaitu efisiensi anggaran..

8. Jumlah Event Kebudayaan yang di selenggarakan

Penyelenggaraan event kebudayaan dengan capaian realisasi 100% telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dimana jumlah event ditargetkan

sebanyak 14 event, sedangkan realisasinya sebanyak 14 event. Hal ini dikarenakan adanya event berskala internasional, serta workshop seni tari.

Event kebudayaan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025, yaitu :

1) Gebyar UMKM
2) Fasilitasi Seni dan Debus
3) Penampilan seni tari HUT Kota Cilegon
4) Fastival Muharam
5) Workshop Seni Tari
6) Audisi Tari
7) Budaye Cilegon Fest and International folk arts (BC FIFA)
8) Seni tari HUT RI
9) Festival ngederes Cibanten
10) Festival Musseum Banten
11) Festival Budaya Tangerang
12) Pertunjukan seni (Resital)
13) Lomba seni silat
14) Festival Golok day

9. Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang Dibina

Indikator Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang Dibina diperoleh melalui pembinaan terhadap kelompok kesenian tradisional terutama dalam pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Kelompok kesenian tradisional Kota Cilegon terdiri atas sanggar, peguron, lembaga dan komunitas

Berikut perhitungan persentase kelompok pelaku kesenian tradisional yang dibina dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Perhitungan Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang Dibina

No	Rumus		Target	Realisasi	Capaian
1	(Jumlah kelompok pelaku kesenian tradisional yang dibina/Jumlah kelompok pelaku kesenian tradisional yang ditargetkan ditahun n) x 100	= $\frac{4}{4}$ x 100 = 100 %	100 %	100 %	100 %

Dari hasil perhitungan, jumlah kelompok kesenian tradisional yang dibina mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana target yang ditetapkan di tahun 2025 sebanyak 4 kelompok, dan realisasi sebanyak 4 kelompok kesenian yang telah dibina. Adapun kegiatan pembinaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pelatihan tari terhadap Sanggar R Studio,Puspa Arum, Duta Seni KS dan sanggar Syailendra dalam penampilan seni dan budaya kota Cilegon dalam acara BC FIFA. Pemberdayaan pelatih yang berasal dari sanggar-sanggar binaan Dindikbud dalam pelatihan kesenian tradisional Kota Cilegon.
2. Pembinaan terhadap Peguron dalam pelatihan seni pencak silat, patingtung dan bendrong lesung pada kegiatan fasilitasi pelatihan kesenian di desa budaya Kubangsari.
3. Pembinaan terhadap Lembaga yaitu GITA BAHANA NUSANTARA dalam kegiatan Paduan suara Cilegon mandiri.
4. Pembinaan terhadap Komunitas Perfilman CREMOV dalam rangka menumbuh kembangkan minat bakat di perfilman, kegiatan pelatihan perfilman yang bertujuan kekalangan anak muda yang ada di kota cilegon dan pencinta film atau sineas.

10. Persentase Kajian Sejarah yang Dilakukan

Berikut perhitungan persentase kajian sejarah yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Perhitungan Persentase Kajian Sejarah yang Dilakukan

No	Rumus		Target	Realisasi	Capaian
1	(Jumlah kajian sejarah yang dilakukan/Jumlah kesejarahan yang ditargetkan ditahun n) x 100	= 0/0 x 100 = 100 %	100 %	0 %	0%

Dari hasil perhitungan, indikator persentase kajian Sejarah yang dilakukan capaiannya 0 di karenakan terdampak kebijakan pemerintah atau terdampak recofusing, sehingga kegiatan kajian tidak bisa di laksanakan seperti tahun sebelumnya.

11. Persentase Penetapan Cagar Budaya

Berikut perhitungan persentase Penetapan Cagar Budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Perhitungan Persentase Penetapan Cagar Budaya

No	Rumus		Target	Realisasi	Capaian
1	(Jumlah cagar budaya yang di tetapkan dalam SK /Jumlah cagar budaya yang dikaji ditahun n) x 100	= 0/0 x 100 = 100 %	100 %	0 %	0%

Dari hasil perhitungan, indikator persentase penetapan cagar budaya capaiannya 0 di karenakan terdampak kebijakan pemerintah atau terdampak recofusing, sehingga kegiatan Penetapan cagar budaya yang telah di rencanakan tidak bisa di laksanakan seperti tahun sebelumnya.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis (Indikator Baru)

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Yang dimaksud dengan angka rata–rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Prosentase angka rata-rata lama sekolah Kota Cilegon pada tahun 2025 memilik target sebesar 10,42 dengan realisasi 10,40 yang artinya secara rata-rata penduduk Kota Cilegon yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 10,40 tahun atau sudah menamatkan kelas XI. Dan capaian realisasi tahun 2025 sebesar 99,81% kategori sangat baik.

Pencapaian indikator angka rata-rata lama sekolah Kota Cilegon pada tahun 2025 sebesar 10,40 tahun, nilai ini kurang sedikit mencapai target yang diinginkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 10,42 tahun dengan capaian kinerja 99,81%. Keberhasilan pencapaian target ini bukan berarti tidak ada hambatan atau ada tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target Adalah Rendahnya angka rata-rata lama sekolah disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga, masih tingginya angka putus sekolah terutama pada transisi ke jenjang pendidikan menengah, keterbatasan akses dan keterjangkauan layanan pendidikan, serta faktor sosial budaya yang belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan pendidikan. Selain itu, struktur penduduk usia dewasa yang secara historis

memiliki tingkat pendidikan rendah turut memengaruhi capaian rata-rata lama sekolah, sehingga peningkatan indikator ini memerlukan intervensi kebijakan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

2. Angka harapan lama sekolah

Angka harapan lama sekolah yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan dari harapan lama sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditujukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Perhitungan angka harapan lama sekolah dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia tertentu yang bersekolah pada tahun tertentu, jumlah penduduk usia tertentu pada tahun tertentu, usia dan adanya faktor koreksi. Angka harapan lama sekolah Kota Cilegon Tahun 2025 sebesar 13,41 itu artinya penduduk Kota Cilegon diharapkan menamatkan pendidikan selama 13,41 tahun atau sampai lulus jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berkuliah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Nilai ini sudah mencapai target yang sudah ditentukan pada tahun 2025 yaitu sebesar 13,73. Dan capaian realisasi tahun 2025 sebesar 97,67 dengan kategori sangat baik.

3. Indeks Pemajuan Kebudayaan

Target Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) pada tingkat nasional untuk tahun 2025 secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) 2025–2045 sebagai bagian dari alat ukur capaian pembangunan kebudayaan. Dalam

dokumen tersebut disebutkan bahwa capaian awal indeks (sebelum 2025) pada tahun 2023 adalah sekitar 57,13 poin, dan pemerintah menargetkan nilai indeks pembangunan kebudayaan meningkat secara bertahap setiap tahun minimal sebesar 0,50 poin, dengan target mencapai sekitar 68,15 poin pada tahun 2045. Artinya, untuk 2025 indeks diharapkan sudah lebih tinggi dari capaian dasar 57,13 dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten menuju target jangka panjang tersebut.

Pada tahun 2025 capaian indeks Pemajuan Kebudayaan sebesar 60,90 dengan target 61.00, adapun hasil di peroleh melalui survei lapangan dan wawancara yang lokasinya di 8 kecamatan dan 43 kelurahan, **Adapun indeks pembangunan kebudayaan Kota Cilegon tahun 2025 adalah sebesar 60,09 % pada skala 0 sampai 100.**

4. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh atas evaluasi APIP terhadap penilaian mandiri program reformasi birokrasi. Untuk tahun 2025 penilaian PMPRB belum selesai dilaksanakan, sehingga sesuai dengan yang tertera pada indikator kinerja utama (IKU) Dindikbud Kota Cilegon, maka nilai yang digunakan adalah nilai n-1, yaitu nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dindikbud Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar **63.08 poin**, predikat **B** = **Cukup Baik**. Adapun rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Per Unsur Tahun 2025

NO	ASPEK	UNSUR	NILAI
1	**Aspek Pemenuhan**		**10.77**
1.1	Manajemen Perubahan		1,32
		Tim reformasi birokrasi	0,27
		Road map reformasi birokrasi	0,29
		Pemantauan dan evaluasibirokrasi	0,50
		Perubahan pola pikir danbudaya kerja	0,27
1.2	Deregulasi Kebijakan		1,00
		Harmonisasi	1,00
1.3	Penataan dan Penguatan Organisasi		1,95
		Evaluasi kelembagaan	0,95
		Tindak lanjut evaluasi	1,00
1.4	Penataan Tata Laksana		1,00
		Proses bisnis dan proseduroperasional tetap	0,50
		Keterbukaan informasi publik	0,50
1.5	Penataan Sistem dan Manajemen SDM		1,10
		Perencanaan kebutuhanpegawai	0,14
		Pengembangan pegawaiberbasis kompetensi	0,13
		Penetapan kinerja individu	0,28
		Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	0,20
		Pelaksanaan evaluasi jabatan	0,14
		Sistem informasi kepegawaian	0,00
1.6	Penguatan Akuntabilitas		1.94
		Keterlibatan pimpinan	0,95
		Pengelolaan akuntabilitaskinerja	1,00
1.7	Penguatan Pengawasan		0,80
		Gratifikasi	0,08
		Penerapan SPIP	0,14
		Pengaduan masyarakat	0,36
		Whistle blowing system	0,20
		Penangan benturankepentingan	0,02
		Pembangunan zona integritas	0,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		1,64
		Standar pelayanan	0,28

NO	ASPEK	UNSUR	NILAI
1.8		Budaya pelayanan prima	0,27
		Pengelolaan pengaduan	0,31
		Penilaian kepuasan terhadappelayanan masyarakat	0,49
		Pemanfaatan teknologi informasi	0,30
2	**Aspek Reform**		**12,00**
2.1	Manajemen Perubahan		2,38
		Komitmen dalam perubahan	1,21
		Komitmen pimpinan	1,00
		Membangun budaya kerja	0,17
2.2	Deregulasi Kebijakan		0,50
		Peran kebijakan	0,50
2.3	Penataan dan Penguatan Organisasi		0,00
		Organisasi berbasis kinerja	0,00
2.4	Penataan Tatalaksana		2,46
		Peta proses bisnis	0,34
		Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	0,63
		Transformasi digital	1,50
2.5	Penataan Sistem Manajeman SDM		1,00
		Kinerja individu	0,50
		Assesmen pegawai	0,00
		Pelanggaran disiplin pegawai	0,50
2.6	Penguatan Akuntabilitas		2,09
		Efektifitas dan efisiensianggaran	0,67
		Pemanfaatan aplikasiakuntabilitas	0.67
		Pemberian reward dan punishment	0,00
		Kerangka logis kinerja	0,75
2.7	Penguatan Pengawasan		0,98
		Penyampaian laporan hartakekayaan pejabat Negara	0,75
		Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara	0,00
		Penanganan pengaduanmasyarakat	0,23
2.8	Peningkatan kualitas pelayanan publik		2,93
		Upaya dan/atau inovasipelayanan publik	2,09
		Penanganan pengaduan danpelayanan konsultasi	0,84

NO	ASPEK	UNSUR	NILAI
Nilai Akhir			22.77
Nilai hasil konversi			63.08

Sumber :LHE PMPRB Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2024

Dengan target yang ditetapkan sebesar **63,08 Poin** dan realisasi yang dicapai sebesar **63,08 poin**, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar **100%** dengan kategori tinggi.

5. Angka Partisipasi PAUD

Angka partisipasi PAUD di Indonesia tahun 2025 menunjukkan tren positif yang stabil, namun masih menghadapi tantangan untuk mencapai cakupan yang lebih luas, terutama di daerah tertentu. Data ini penting untuk mengukur keberhasilan program pemerintah dalam memperluas akses pendidikan usia dini

Dibawah ini merupakan perhitungan Angka partisipasi PAUD yang ada di Kota Cilegon :

Tabel 3.17
perhitungan Angka partisipasi PAUD tahun 2025

No	Rumus		Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Partisipasi PAUD (%)	= $\frac{\text{Jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang ikut PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5 - 6 tahun}}$ x 100 = $\frac{15943}{19947} x\ 100\%$	77,30 %	79,92%	103,38%

Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD terealisasi 79,92 %; diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Usia 5-6 Pada Sekolah PAUD terhadap Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun. Dengan target yang ditetapkan sebesar 77,30 % dan capaian

realisasi 79,92% atau 103,38% dapat menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 77,30% dengan kategori sangat baik.

6. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar di Kota Cilegon tahun 2025 untuk kelompok umur 7-15 tahun. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,13 persen, untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 99,70 persen, adapun target Angka partisipasi Sekolah Pendidikan dasar seberar 98,53% terealisasi 99,33% atau 100,81%, dengan begitu realisasi melebihi target yang di tetapkan.

Dibawah ini merupakan perhitungan Angka partisipasi Pendidikan dasar yang ada di Kota Cilegon :

Tabel 3.18
perhitungan Angka partisipasi Pendidikan Dasar tahun 2025

No	Rumus		Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	$= \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang menempuh pendidikan SD SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-15 tahun}} \times 100$ $= \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang menempuh pendidikan SD}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$			

		= $\frac{53270}{53733} x\ 100\%$ = **99,13%** = Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang menempuh pendidikan SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 = $\frac{25370}{25445} x\ 100\%$ **= 99,70%** = Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang menempuh pendidikan SD SMP = Jumlah penduduk usia 7-15 tahun x 100 = $\frac{78.640}{79.178} x\ 100\%$ **=99,33%**	98,53	99,33	100.81%

Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI) telah terealisasi 99,13%; didapat dengan membandingkan antara Jumlah Usia 7-12 pada jenjang SD/MI terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun. Secara umum, capaian tersebut menunjukan jenjang pendidikan dasar di Kota Cilegon telah memadai dengan adanya dukungan ketersediaan sarana–prasarana di sekolah

Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs) telah terealisasi 99,70%; didapat dengan membandingkan antara Jumlah Usia 13-15 Pada jenjang SMP/MTs terhadap Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun. Akan tetapi banyaknya siswa SMP yang usianya kurang dari 13 tahun dan lebih dari 15 tahun tidak masuk data perhitungan, sehingga capaian tidak maksimal. Namun secara umum, capaian tersebut menunjukan jenjang sekolah menengah pertama di Kota Cilegon telah memadai dengan didukung ketersediaan sarana–prasarana di sekolah.

Dengan target yang ditetapkan sebesar 98,53 % dan capaian realisasi sebesar 99,33% dapat menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 98,53. dengan kategori sangat baik.

7. Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan

Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan dengan target 25,53% telah terealisasi 56,40%. Atau 221% Angka tersebut didapat dari perbandingan antara Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan. Hal ini menunjukkan terpenuhinya Pendidikan Kesetaraan, sehingga capaian nya 221%.

Dibawah ini merupakan perhitungan Angka partisipasi Pendidikan dasar yang ada di Kota Cilegon 9

Tabel 3.19
Perhitungan Angka partisipasi Pendidikan Kesetaraan tahun 2025

No	Rumus		Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kota Cilegon X 100%	25,53%	56,40%	221%

		$= \frac{1102}{1954} x\ 100$ = 56,40%			

Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan dengan target 25,53% telah terealisasi 56,40% atau 221%. Angka tersebut didapat dari perbandingan antara Jumlah Warga Belajar Usia 7-18 Pada PendidikanKesetaraan terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-18 tahun yang tidak tamat pendidikan dasar/menengah. Hal ini menunjukkan terpenuhinya Pendidikan Kesetaraan, sehingga capaian nya 221%.

8. Persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan

Indikator objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan diperoleh melalui beberapa aspek objek pemajuan kebudayaan seperti, seni, bahasa, pengetahuan tradisional, adat istiadat, teknologi tradisional dan olah raga tradisional. Adapun sub objek pemajuan kebudayaan yaitu, tari, vocal, teater karawitan dan film, dalam pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Kota Cilegon.

Dibawah ini merupakan perhitungan Angka partisipasi Pendidikan dasar yang ada di Kota Cilegon :

Tabel 3.20
Perhitungan Objek Pemajuan Kebudayaan tahun 2025

No	Rumus		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang di lestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang lestarikan / jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditargetkan tahun -N X 100% $= \frac{6}{7} x\ 100$ = 81,71%	100%	85,71%	85,71%

Dari tabel di atas, bahwa indikator persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan capaiannya hanya 85,71% tidak memenuhi target yang di tetapkan yaitu 100% namun capaiannya masih di atas 80%.

D. Analisis Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
(Indikator Lama)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	**Peningkatan Layanan Pemerintahan** S1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	81.50 Poin	81.81 Poin	100,38%	Terdapat gambaran bahwa instansi dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4.	Melaksanakan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari Tim Evaluator.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		Indeks RB Perangkat Daerah	73.47 Poin	63.08 Poin	85,84%	Interpretasi penerapan reformasi birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.	1. Meningkatkan kapasitas SDM: Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan Bimtek berkelanjutan. 2. Menggunakan teknologi informasi: Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi RB. 3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi: Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerj
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	88.00 Poin	90.43	102,76%	Kemudahan akses layanan, pelayanan yang cepat dan tepat waktu, penyelesaian masalah yang efektif dan responsif, pemberian informasi yang jelas dan akurat.	**Meningkatkan kualitas pelayanan**: Kualitas pelayanan yang diberikan oleh OPD Pelayanan Publik dapat mempengaruhi kepuasan Masyarakat **Kompetensi SDM** Kompetensi SDM yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan Masyarakat **Sarana dan prasarana:** Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. **Proses pelayanan:** Proses pelayanan yang efisien dan efektif dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
2	**Peningkatan Kualitas Pendidikan** S2.1.1 Terwujudnya Kualitas Pendidikan yang Merata	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	100 %	84.44%	84,44%	Analisis keberhasilan dan kegagalan Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pendidikan Kota Cilegon dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti: dimasyarakat. 1, **Ketersediaan Sumber Daya:** Ketersediaan sumber daya, seperti guru, fasilitas, dan anggaran, sangat mempengaruhi pencapaian kinerja SPM Pendidikan. 2. **Kualitas Guru:** Kualitas guru yang memadai dapat meningkatkan pencapaian kinerja SPM	1. **Meningkatkan Kualitas Guru:** Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. 2.**Meningkatkan Ketersediaan Sumber Daya:** Meningkatkan ketersediaan sumber daya, seperti fasilitas dan anggaran, untuk mendukung pendidikan. 3..**Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui sosialisasi dan kampanye.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						Pendidikan. 3. **Kurikulum yang Relevan**: Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan pencapaian kinerja SPM Pendidikan	
		Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi	57.40%	39.23%	68,23%	Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi di Kota Cilegon merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas pendidikan. Sertifikasi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi: **Keberhasilan:** 1.Meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan 2.Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan 3.Meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar **Kegagalan:** 1. Kurangnya kesadaran guru untuk mengikuti sertifikasi. 2. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. 3. Proses sertifikasi yang rumit dan memakan waktu.	1.**Meningkatkan kesadaran guru:** Meningkatkan kesadaran guru tentang pentingnya sertifikasi melalui sosialisasi dan pelatihan. 2.**Meningkatkan dukungan pemerintah:** Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam proses sertifikasi guru. 3.**Menyederhanakan proses sertifikasi:** Menyederhanakan proses sertifikasi agar lebih mudah dan cepat.
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	100 %	100%	100,00%	Analisis keberhasilan dan kegagalan Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin di Kota Cilegon sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Izin lembaga pendidikan adalah proses untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah bahwa lembaga pendidikan tersebut telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan **Keberhasilan:** 1. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan	1.**Meningkatkan kesadaran lembaga** pendidikan: Meningkatkan kesadaran lembaga pendidikan tentang pentingnya izin melalui sosialisasi dan pelatihan. 2.**Meningkatkan dukungan pemerintah:** Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam proses perizinan lembaga pendidikan. 3.**Menyederhanakan proses perizinan:** Menyederhanakan proses perizinan agar lebih mudah dan cepat.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						2.Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pendidikan 3.Meningkatkan akuntabilitas lembaga Pendidikan **Kegagalan:** 1. Kurangnya kesadaran lembaga pendidikan untuk mendapatkan izin. 2. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah 3. - Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu	4.**Meningkatkan pengawasan:** Meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pendidikan yang tidak memiliki izin.
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah Pada Masyarakat Usia Sekolah	84,55%	0 %	0 %	Analisis keberhasilan dan kegagalan Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah Pada Masyarakat Usia Sekolah di Kota Cilegon sangat penting untuk melestarikan budaya dan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu aspek penting dalam identitas budaya suatu daerah: **Keberhasilan:** 1.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa daerah 2.Meningkatkan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari 3. Melestarikan budaya dan bahasa daerah. **Kegagalan:** 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa daerah 2. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah 3. Pengaruh bahasa asing yang kuat	1.**Meningkatkan kesadaran masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa daerah melalui sosialisasi dan pelatihan. 2.**Meningkatkan dukungan pemerintah:** Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam melestarikan bahasa daerah. 3.**Mengintegrasikan bahasa daerah dalam kurikulum**: Mengintegrasikan bahasa daerah dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan penggunaan bahasa daerah. 4. **Mengadakan kegiatan budaya:** Mengadakan kegiatan budaya yang mempromosikan bahasa daerah, seperti festival bahasa daerah.
3	**Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat** S5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan	Jumlah Event kebudayaan yang di selenggarakan	14 Event	14 Event	100,00%	Pembinaan kelompok pelaku kesenian tradisional telah dilakukan sesuai target kinerja, kepada empat kelompok pelaku kesenian. Pembinaan dilakukan dengan melibatkan secara	Menambah sumber daya agar pembinaan yang dilakukan lebih bervariasi, sehingga dapat melibatkan kelompok pelaku kesenian yang lebih banyak lagi.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Destinasi Wisata					langsung pada kegiatan yang diselenggarakan Dindikbud, baik dalam bentuk pelatihan maupun event-event . Namun karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki, belum semua sanggar, peguron, lembaga dan komunitas ikut berpartisipasi.	
		Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisonal yang Dibina	100 %	100 %	100,00%	Pembinaan kelompok pelaku kesenian tradisional telah dilakukan sesuai target kinerja, kepada empat kelompok pelaku kesenian. Pembinaan dilakukan dengan melibatkan secara langsung pada kegiatan yang diselenggarakan Dindikbud, baik dalam bentuk pelatihan maupun event-event . Namun karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki, belum semua sanggar, peguron, lembaga dan komunitas ikut berpartisipasi.	1.**Meningkatkan kesadaran masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesenian tradisional melalui sosialisasi dan pelatihan. 2.**Meningkatkan dukungan pemerintah:** Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam membina kelompok pelaku kesenian tradisional. 3. **Meningkatkan fasilitas dan sumber daya:** Meningkatkan fasilitas dan sumber daya untuk kelompok pelaku kesenian tradisional, seperti tempat latihan dan peralatan. 4. **Mengadakan pelatihan dan workshop:** Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kualitas kesenian tradisional.
		Persenase Kajian Sejarah yang Dilakukan	100 %	0 %	0 %	Pada tahun 2025 Dindikbud banyak mengalami pembatasan pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan penyusunan Kajian Sejarah tidak bisa dilaksanakan sesuai target.	Melakukan koordinasi bersama pihak terkait agar kajian sejarah kota cilegon semakin bertambah setiap tahunnya.
		Persenase penetapan cagar budaya	100 %	0%	0%	Pada tahun 2025 Dindikbud banyak mengalami pembatasan pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan penetapan cagar budaya tidak bisa dilaksanakan sesuai target.	Melakukan koordinasi bersama pihak terkait agar kajian sejarah kota cilegon semakin bertambah setiap tahunnya.

Sedangkan di bawah ini adalah analisis keberhasilan indikator baru sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

Tabel 3.21.1
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
(Indikator Baru)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	**Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata**	Rata-Rata Lama Sekolah	10,42	10,40	99.81%	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Cilegon menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, RLS di Kota Cilegon mencapai 10,41 tahun, melebihi target yang ditetapkan yaitu 10,17 tahun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Cilegon memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, **Keberhasilan RLS** 1. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat 2. Kualitas pendidikan yang meningkat. 3. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang efektif. **Kegagalan:** 1. Kurangnya akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. 2.Kualitas pendidikan yang belum merata. 3.Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	1.Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan 2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan perbaikan infrastruktur sekolah. 3. - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui kampanye dan sosialisasi.
		Harapan Lama Sekolah	13,73	13,41	97,67%	Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Cilegon menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan HLS di Kota Cilegon, perlu dilakukan analisis lebih lanjut. **Keberhasilan** 1. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. 2. Kualitas pendidikan yang meningkat. 3. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang efektif	1. Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan perbaikan infrastruktur sekolah. 3.Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui kampanye dan sosialisasi.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						Kegagalan: 1.Kurangnya akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. 2,Kualitas pendidikan yang belum merata, 3,- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	61.00	60,09	98,51,87%	Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan kebudayaan di Indonesia. IPK memiliki beberapa komponen, termasuk pelestarian warisan budaya, partisipasi masyarakat dalam kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan dan literasi budaya, serta pengelolaan kekayaan budaya . **Keberhasilan IPK** 1. IPK menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu, yang menandakan kemajuan dalam pembangunan kebudayaan di Indonesia. 2. IPK telah menjadi acuan dalam formulasi kebijakan kebudayaan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. **Kegagalan IPK**: 1.Kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah, yang terlihat dari rendahnya dana untuk program kebudayaan. 2.Keterlambatan dalam penyusunan kebijakan pelestarian budaya yang berkelanjutan. 3.Kurangnya dukungan terhadap kegiatan seni dan budaya di tingkat lokal maupun nasional	1. Meningkatkan alokasi sumber daya untuk kebudayaan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebudayaan. 3 . Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kebudayaan. 4. Meningkatkan pendidikan dan literasi budaya. 5. Menguatkan pengelolaan kekayaan budaya
2	**Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata**	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,08	63,08	100%	Interpretasi penerapan reformasi birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi	1. Melaksanakan tugas sesuai rencana kerja, melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja serta evaluasi ditindaklanjuti. 2. Dilakukan pengembangan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	S2.1.1 Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional						pegawai berbasis kompetensi. 3. Melakukan monev atas pencapaian kinerja individu. 4. Dilakukan implementasi dan evaluasi (gratifikasi, benturan kepentingan). 5. Melakukan tindaklanjut hasil survey kepuasan masyarakat.
3	**Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata** S2.1.1 Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang Berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	77.30	79,92	103,39%	Angka Partisipasi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kota Cilegon menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. **Keberhasilan** 1. Peningkatan akses pendidikan bagi anak usia dini. 2. Kualitas pendidikan yang meningkat. 3. Program PAUD yang efektif. **Kegagalan** 1. Kurangnya akses pendidikan bagi anak usia dini di daerah terpencil. 2. Kualitas pendidikan yang belum merata. 3 Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini	1. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini di daerah terpencil melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan perbaikan infrastruktur sekolah. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini melalui kampanye dan sosialisasi
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	98.53	99,33	100,81%	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (APK) di Kota Cilegon menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. **keberhasilan** 1. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. 2. Kualitas pendidikan yang meningkat. 3.Program pendidikan dasar yang efektif. **kegagalan**. 1.Kurangnya akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. 2.Kualitas pendidikan yang belum merata. 3.Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	1. Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan perbaikan infrastruktur sekolah. 3.Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui kampanye dan sosialisasi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	25.53	56,40	220.92%	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (APK) di Kota Cilegon menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. **Keberhasilan:** 1. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. 2.Kualitas pendidikan yang meningkat. 3.Program pendidikan kesetaraan yang efektif **Kegagalan:** 1.Kurangnya akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu di daerah terpencil. 2.Kualitas pendidikan yang belum merata. 3.- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan kesetaraan	1.Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan. 2.Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan perbaikan infrastruktur sekolah. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan kesetaraan melalui kampanye dan sosialisasi
4	**Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata** S2.1.1 Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan yang di kembangkan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	100 %	85,71	85,71%	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan di Kota Cilegon menunjukkan bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa poin penting: **Keberhasilan:** 1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebudayaan. 2.Pengembangan objek pemajuan kebudayaan lokal, seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. 3.Pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan kebudayaan lokal **Kegagalan:** 1. Kurangnya akses ke sumber daya dan dana untuk pelestarian kebudayaan. 2.Kurangnya kesadaran	1.Meningkatkan akses ke sumber daya dan dana untuk pelestarian kebudayaan. 2.Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebudayaan melalui pendidikan dan promosi. 3.Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan. 4.Mengembangkan program pelestarian kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						masyarakat akan pentingnya pelestarian kebudayaan. 3.Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan	

Pencapaian pernyataan kinerja sangat bergantung pada efektivitas dan keberhasilan berbagai program atau kegiatan yang dilaksanakan. Program yang baik harus menunjang tujuan dan indikator kinerja yang ditetapkan, sedangkan kegagalan dalam pelaksanaan program dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian kinerja yang talah ditetapkan. Berikut merupakan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Tabel 3.22
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan (Indikator Lama)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
51	**Peningkatan Layanan Pemerintahan** S1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	100,38%				
		Indeks RB Perangkat Daerah	85,84%				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	102,76%				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	100,38%	
					Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85,84%	
					Nilai Lakip Perangkat Daerah	102,76%	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
					Daerah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
2	**Peningkatan Kualitas Pendidikan** S2.1.1 Terwujudnya Kualitas Pendidikan yang Merata	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	84.44%	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	84.44%	
				Pengelolaan Pendidikan Dasar	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	85,78%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80,90%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	96,71%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	95.52%	Menunjang
		Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi	39.23 %	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Proporsi Pendidik yang telah Lulus Sertifikasi	39,23%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	97,05%	Menunjang
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	100%	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	100,00%	
				Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	85,67%	Menunjang
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0%	Menunjang
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah Pada Masyarakat Usia Sekolah	0%	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	0%	
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0%	Menunjang
3	**Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat** S5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan Destinasi Wisata	Jumlah event kebudayaan yang di selenggarakan	100%	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah event kebudayaan yang di selenggarakan	100%	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
		persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisonal yang Dibina	100%	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang dibina	100,00%	
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
		Persenase Kajian Sejarah yang Dilakukan	0%	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Prosentase kajian sejarah yang dilakukan/jumlah kesejarahan yang ada	0%	
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	00%	Menunjang
		Persenase penetapan cagar budaya	0%	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Penetapan Cagar Budaya	0%	
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0%	Menunjang

Sedangkan di bawah ini adalah analisis keberhasilan indikator baru sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

Tabel 3.22.1
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
(Indikator Baru)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Terwujudnya pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan yang berkualiats dan merata	Harapan Lama Sekolah	97,67%				
		Rata-rata lama sekolah	99,81%				
		Indeks pembangunana Kebudayaan (IPK)	98,51%				
1	**Terwujudnya pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan yang berkualiats dan merata** S2.1.1 Terwujudnya tata Kelola Pendidikan yang Kualitas	1. Angka Partisipasi PAUD. 2. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar. 3. Angka Partisipasi Pendidikan kesetaraaan	103,39% 100,81% 221%	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	110,79%	
					Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	121,15	
					Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	127,24%	
					Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	130,56%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Iklim Keamanan SD	99,08%	
					Iklim Kebhinekaan SD	99,10%	
					Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	112,11%	
					Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	121,99%	
					Iklim Keamanan SMP	99,62%	
					Iklim Kebinekaan SMP	86,97%	
					Iklim Inklusivitas SMP	96,01%	
					Iklim Inklusivitas SD	96,25%	
				Pengelolaan Pendidikan Dasar	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	86,78%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80.90%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	96.71%	Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	121,18%	Menunjang
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	89,48%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100,00%	
				Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,00%	Menunjang
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	50%	
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0%	Menunjang
2	**Terwujudnya pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan yang berkualiats dan merata** S2.1.1 Terwujudnya pelestarian kebudayaan yang di kembangkan	Persentase objek Pemajuan Kebudayaan yang di lestariak	85,71%	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	98,96%	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	98,96%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	98,55%	
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase kajian sejarah yang dilakukan/ jumlah kesejarahn yang ada	0%	
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	0%	
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	Menunjang
3	**Terwujudnya pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan yang berkualiats dan merata** S2.1.1 Terwujudnya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang AKuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	102,76%	
					Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85,86%	
					Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah	72,73%	
					Indeks Pelayanan Publik	72,20%	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,22%	
					Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	120%	
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan	90,35%	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang

E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.23

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**362.789.990.951**	**355.843.847.058**	**98,08%**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.358.000	106.270.000	93,74%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	346.744.031.197	341.304.963.952	98,43%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	761.304.309	704.125.500	92,48%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.460.814.995	13.091.248.686	90,52%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.482.450	637.238.920	89,69%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**161.306.746.083**	**155.938.057.292**	**96,67%**
	Pengelolaan Pendidikan Dasar	86.326.586.939	83.245.238.665	96,43%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.399.460.594	44.579.654.525	96,08%
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	23.260.166.550	22.919.969.102	98,54%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.320.532.000	5.193.195.000	97,60%
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**291.213.000**	**282.608.500**	**97,04%**
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	291.213.000	282.608.500	97,04%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**18.914.000**	**16.204.000**	**85,67%**
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	18.914.000	16.204.000	85,67%
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**54.244.000**	**54.244.000,**	**100%**
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.244.000	54.244.000,	100%
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**1.119.224.200**	**1.085.586.835**	96,99%
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.119.224.200	1.085.586.835	96,99%
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**915.218.500**	**853.489.980**	**93,25%**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	915.218.500	853.489.980	93,25%
8.	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**0**	**0**	**0**
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
9	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**17.267.000**	**15.018.000**	**86,97%**
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	478.000	239.000	50.00%
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	16.789.000	14.779.000	88,02%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dindikbud Kota Cilegon adalah sebesar **Rp 514.089.055.665** atau **97,64%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 526.512.817.734**,-

F. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang optimal. Efisiensi sumber daya berkaitan dengan bagaimana suatu entitas memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan output atau hasil tertentu, dengan meminimalkan pemborosan dan peningkatkan produktivitas.

Tingkat efisiensi dikategorikan sebagai berikut :

- ✓ Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien
- ✓ Jika tingkat efisiensi dama dengan 1, maka impas
- ✓ Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1, maka efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran (Indikator Lama)

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
1	**Peningkatan Layanan Pemerintahan** S1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	81.50 Poin	81.81 Poin	100,38%	362.789.990.951	355.843.847.058	98%	1,02
		Indeks RB Perangkat Daerah	73,47 Poin	63.08 Poin	85,84%				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	88.00 Poin	90.43 Poin	102,76%				

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
2	**Peningkatan Kualitas Pendidikan** S2.1.1 Terwujudnya Kualitas Pendidikan yang Merata	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	100 %	84.44%	84,44%	161.306.746.083	155.938.057.292	97%	0,87
		Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi	57.40%	39.23%	68,34%	291.213.000	282.608.500	97%	0,70
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	100 %	100%	100,00%	18.914.000	16.204.000	86%	1,16
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah Pada Masyarakat Usia Sekolah	84.55%	0%	0%	54,244,000	54,244,000	100%	0
3	**Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat** S5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan Destinasi Wisata	Jumlah Event Kebudayaan yang diselenggarakan	14 Even	14 Even	100,00%	1.119.224.200	1.085.586.835	97%	1,03
		Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisonal yang Dibina	100 %	100 %	100,00%	915.218.500	853.489.980	93%	1,07
		Persenase Kajian Sejarah yang Dilakukan	100 %	0%	0%	0	0	0	0
		Persentase penetapan cagar Budaya	100%	0	0	17.267.000	15.018.000	87%	0

Tabel 3.24.1
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran (Indikator Baru)

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
1	**Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan dan**	Harapan Lama Sekolah	13,73	13,41	97,67%				

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Kebudayaan yang berkualitas dan merata	Rata-rata Lama sekolah	10,42	10,40	99,81%				
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	61 Poin	60,09 Poin	98,81%				
1.	**Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas dan merata** S2.1.1 Terwujudnya tata Kelola Pendidikan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	63,08	63,08	100	362.789.990.951	355.843.847.058	98%	1,02
2	**Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas dan merata** S2.1.1 Terwujudnya tata Kelola Pendidikan yang berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	77,30 %	79,93%	103,39%	23,260,166,550	22.919.969.102	99%	1,04
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	98,53%	99,33%	100,81%	133.090.418.533	127.824.893.190	96%	1,04
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	25,53%	56,40%	221%	5.320.532.000	5.193.195.000	98%	2,26
3	**Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas dan merata** S2.1.1 Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan yang di kembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudyaan yang di lestarikan	100	85,71	85,71%	2,051,709,700	1,954,094,815	95%	1,04

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			**79,08%**	**526.512.817.743**	**514.089.055.665**	**98%**	**81**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**72,61%**	**362.789.990.951**	**355.843.847.058**	**98%**	**74**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	93,74%	100,00%	113.358.000	106.270.000	93,74%	0,90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	71,78%	72%	346.744.031.197	341.304.963.952	98,43%	0,99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	92,48%	92%	761.304.309	704.125.500	92,48%	0,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0%	0,00%	0	0	0,00%	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90,52	91%	14.460.814.995	13.091.248.686	90,52	0,99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	89,69	90%	710.482.450	637.238.920	89,69	0,99
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**100%**	**93,39%**	93%	**161.306.746.083**	**155.938.057.292**	**96,67%**	0,99
	Pengelolaan Pendidikan Dasar	100%	93,03%	93%	86.326.586.939	83.245.238.665	96,43%	0,99
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	91,15%	91%	46.399.460.594	44.579.654.525	96,08%	0,99
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	100%	98,27%	98%	23.690.615.000	22.919.969.102	98,54%	0,99
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	97,60%	98%	5.320.532.000	5.193.195.000	97,60%	0,99
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**100%**	**97,04%**	**97%**	**291.213.000**	**282.608.500**	**97,04%**	0,99

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6	6%	100,00%	291.213.000	282.608.500	97,04%	1,03
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**100%**	**85,67%**	**86%**	**18.914.000**	**16.204.000**	**85,67%**	**0,09**
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	63%	63%	100,00%	18.914.000	16.204.000	85,67%	1,16
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**100%**	**100%**	**100%**	**54.244.000**	**54.244.000**	**100%**	**1**
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	228%	0%	0%	54.244.000	54.244.000	100%	0
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**100**	**100**	**100%**	**1.119.224.200**	**1.085.586.835**	**97%**	**1,03**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	14	14	100%	1.119.224.200	1.085.586.835	97%	1,03
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**915.218.500**	**853.489.980**	**93%**	**1,07**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	915.218.500	853.489.980	93%	1,07
8	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**100%**	**0%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	0	0	0	0	0	0
9	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**100**	**100**	**100%**	**17.267.000**	**15.018.000**	**87%**	**1,14**
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	6	0	0%	478.000	239.000	50%	0
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	11	0	0%	16.789.000	14.779.000	88%	0

Dari hasil pengukuran tingkat efisiensi di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi Dindikbud Kota Cilegon mencapai lebih dari satu sehingga dikategorikan **efisien**.

Selama tahun 2025, Dindikbud Kota Cilegon telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

a. Pemakaian listrik, air dan jaringan internet digunakan pada saat jam kerja
b. Alat tulis kantor digunakan sesuai kebutuhan
c. Melakukan negosiasi penawaran pada pengadaan barang dan jasa
d. Pemanfaatan teknologi informasi
e. Pengalokasian anggaran dilakukan secara efektif dan efisien

G. INOVASI

Pendidikan memegang peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia, merujuk pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan".

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon telah mengambil langkah inovatif dengan meresmikan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Ini adalah sebuah terobosan besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas pendidikan bagi masyarakat dengan disabilitas di Kota Cilegon.

Dengan adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD), diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan ramah bagi siswa dengan disabilitas, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif di Kota Cilegon. ULD juga dapat menjadi pusat informasi dan koordinasi bagi guru, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kebutuhan siswa dengan disabilitas.

Inovasi ini juga menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi semua warga, tanpa terkecuali. Semoga dengan adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD), Kota Cilegon dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas pendidikan bagi masyarakat dengan disabilitas.

H. PENGHARGAAN

Di tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon memperoleh penghargaan :

- ✓ Juara 1 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Propinsi Banten yaitu Program Iovasi Anak Tidak Sekolah (ATS).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap jalannya pembangunan pendidikan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang dilihat dari capaian kinerja dan realisasi anggaran. Hasil laporan kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon menetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sedangkan untuk indikator baru sesuai dengan RPJMD 2025-2029 terdapat 1 Tujuan, 3 Sasaran dengan 8 Indikator yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemeritah dan Profesional Aparatur terdiri dari tiga indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar :
    1. Nilai Lakip Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100.38 % (Baik Sekali).
    2. Indeks RB Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 85.84% (Baik).
    3. Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) dengan capaian kinerja sebesar 102.76% (Baik Sekali).

- Sasaran Terwujudnya Kualitas Pendidikan yang Merata terdiri dari empat indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar :
  1. Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan dengan capaian kinerja sebesar 84.44% (Baik).
  2. Proporsi Pendidik yang Telah Lulus Sertifikasi dengan capaian kinerja sebesar 68.34% (Sedang).
  3. Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin dengan capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi).
  4. Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah dengan capaian kinerja sebesar 0% (buruk).
- Sasaran Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan Destinasi Wisata terdiri dari empat indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar :
  1. Jumlah Event Kebudayaan yang Diselenggarakan dengan capaian kinerja sebesar 100% (sangat tinggi)
  2. Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional yang Dibina dengan capaian kinerja sebesar 100% (Baik Sekali).
  3. Persentase Kajian Sejarah yang Dilakukan dengan capaian kinerja sebesar 0% (Buruk)
  4. Persentase Penetapan Cagar Budaya dengan capaian kinerja sebesar 0% (Buruk)

Sedangkan untuk indikator utama RPJMD tahun 2025-2029 dengan tujuan Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata sebagai berikut:

1. Rata-Rata Lama Sekolah dengan capaian kinerja sebesar 99,81% (Baik).
2. Harapan Lama Sekolah dengan capaian kinerja sebesar 97,67% (Baik).

3. Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan capaian kinerja sebesar 98,51% (Baik).

- Sasaran Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional dengan indikator sebagai berikut :

1. Indeks RB Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 85.84% (Baik).

- Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang Berkualitas dengan indikator sebagai berikut :

A. Angka Partisipasi PAUD dengan capaian kinerja sebesar 103,39% (Sangat Baik).
B. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar dengan capaian kinerja sebesar 100,81% (Sangat Baik).
C. Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan dengan capaian kinerja sebesar 211% (Sangat Baik).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, walau ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target di karenakan adanya kebijakan pemerintah sehingga terdampak efisiensi anggaran yang mengakibatkan kegiatan tidak di laksanalan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 526.512.817.734,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 416.409.429.253,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 79,08% dan nilai efisiensi anggaran sebesar Rp 110.103.388.481,-

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Cilegon telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi serta peningkatan tata kelola pendidikan. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada segenap yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun Anggran 2025 ini dapat terwujud.

B. SARAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, Khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dengan RPJMD tahun 2025-2029 dipenuhi sesuai dengan harapan. Beberapa indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, semata-mata karena kelemahan dan ketidak sempurnaan kami. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Kedepan perencanaan kerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan dilakukan sangat efektif sehingga kegiatan yang direncanakan tepat sasaran sesuai dengan target indikator kinerja.
b. Peningkatan dan Pengembangan SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaaan, pendidikan dan pelatihan yang profesional.
c. Peran serta partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk mendukung program-program pendidikan dan kebudayaan di Kota Cilegon sehingga di tahun-tahun mendatang semua sasaran dan indikator dapat tercapai sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Kota Cilegon dan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2025-2029

d. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dan lintas sektoral seperti, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappedalitbang DP3AK2KB dan lain-lain.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Cilegon telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi serta peningkatan tata kelola pendidikan. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada segenap yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun Anggran 2025 ini dapat terwujud.

Cilegon, Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA CILEGON

Dra. Hj. HENI ANITA SUSILA, M.Pd
NIP. 19680225 199303 2 005
Pembina Utama Muda